PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN 2005-2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR.04.... TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

nimbang :

a. bahwa Kabupaten Nagan Raya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu memetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025;

engingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 33);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

enetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2005-2025.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati Nagan Raya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Nagan Raya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nagan Raya untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Nagan Raya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJM Aceh;

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Kabupaten Nagan Raya;

RPJP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

P Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Aceh nakan sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan bangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 m bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan.

Pasal 4

P Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai kut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2005-2025
BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII : PENUTUP

Pasal 5

RPJP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program bupati;

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD;

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

ıda saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2007 ıtang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun)07-2012 dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ır lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

r setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini gan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 1 Desember 2011 M
5 Muharam 1433 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

ndangkan di : Suka Makmue
la tanggal : 5 Desember 2011 M
9 Muharam 1433 H

KRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. T. ZAMZAMI TS

ERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011 NOMOR 08

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Maksud dan Tujuan I-4
1.2.1 Maksud I-4
1.2.2 Tujuan I-4
1.3 Landasan Penyusunan I-6
1.4 Hubungan RPJP Kabupaten Nagan Raya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-8
1.5 Sistematika Penyusunan I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN NAGAN RAYA ... II-1

2.1 Sejarah II-1
2.2 Geografis dan Demografi II-3
2.2.1 Letak, Batas, dan Luas Wilayah II-3
2.2.2 Geomorfologi II-5
2.2.3 Klimatologi II-5
2.2.4 Hidrologi II-6
2.2.5 Litologi II-6
2.2.6 Potensi Wilayah Pengembangan II-7
2.2.7 Wilayah Rawan Bencana II-7
2.2.8 Demografi II-9
2.3 Syariat Islam II-12
2.4 Kesejahteraan Masyarakat II-14
2.4.1 Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi II-14
2.4.2 Kesejahteraan Sosial II-17
2.5 Pelayanan Umum II-28
2.5.1 Ketenagakerjaan II-28
2.5.2 Sarana dan Prasarana Umum II-30
2.5.3 Perdagangan II-33
2.6 Daya Saing II-34

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-1

3.1 Permasalahan dan Tantangan III-1
3.2 Analisis Isu-isu Strategis III-5

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2005-2025 ..... IV-1

4.1 Visi IV-1
4.2 Misi IV-3

BAB V ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA V-1

5.1 Sasaran Pokok Pembangunan V-1
5.2 Arah Kebijakan V-7
5.2.1 Bidang Agama, Sosial, dan Budaya V-7
5.2.2 Bidang pemerintahan, Politik, dan Hukum V-9
5.2.3 Bidang Ekonomi V-14
5.2.4 Bidang Pendidikan V-16
5.2.5 Bidang Kesehatan V-18
5.2.6 Bidang Infrastruktur V-18
5.3 Tahapan dan Prioritas V-21
5.3.1 Tahapan Pembangunan Ke-1 (2005-2009) V-21
5.3.2 Tahapan Pembangunan Ke-2 (2010-2014) V-27
5.3.3 Tahapan Pembangunan Ke-3 (2015-2019) V-31
5.3.4 Tahapan Pembangunan Ke-4 (2020-2025) V-34

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN VI-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggal 10 April 2002 merupakan tanggal yang sangat bersejarah bagi masyarakat Nagan Raya karena pada tanggal tersebut bekas Wedana ini secara resmi menjadi Daerah Otonom baru di Provinsi Aceh dengan Ibukotanya Suka Makmue berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sekarang Provinsi Aceh). Pemekaran ini memberi dampak yang nyata dalam proses dan pemerataan pembangunan di seluruh Wilayah Kabupaten Nagan Raya. Hal ini terbukti dengan adanya pemekaran, pembangunan di segala sektor telah menampakkan hasil yang cukup baik, baik di perdesaan maupun di perkotaan.

Gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang melanda wilayah pesisir Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Nagan Raya telah menyisakan dampak yang cukup serius dalam pembangunan, diantaranya dua kecamatan di pesisir Kabupaten Nagan Raya mengalami kerusakan yang cukup berat yang meliputi 16 gampong. Bencana ini merenggut ribuan jiwa dan menyebabkan rusaknya berbagai infrastruktur pemerintah di wilayah pesisir. Bencana tersebut mengakibatkan pula kehidupan sosial masyarakat terganggu dimana banyak orang-orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Selain itu, karena bencana tsunami itu juga Kabupaten Nagan Raya menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat nasional dan internasional. Hal ini yang menjadi pendorong bagi lembaga

donor, NGO, Pemerintah dan berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam memulihkan dan merekonstruksi Kabupaten Nagan Raya.

Tahapan penting lainnya bagi Aceh dalam memasuki kehidupan damai untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Damai (MOU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dilaksanakan di Helsinki – Swedia pada tanggal 15 Agustus 2005. Momentum ini sangat perlu diimplementasikan dan dipelihara oleh seluruh komponen masyarakat di Provinsi Aceh pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada khususnya sebagai modal dasar dalam mendukung perencanaan pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memiliki implikasi yang besar sebagai landasan untuk pembangunan. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan langkah awal dalam perwujudan demokrasi yang ada di Aceh. Hal-hal tersebut merupakan bagian sejarah Aceh dan khususnya Kabupaten Nagan Raya, tiba saatnya kini kita bangkit untuk membangun kembali Nagan Raya di berbagai bidang.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah harus menyusun Perencanaan Jangka Panjang Daerah dua puluh tahun. Atas dasar arahan tersebut serta dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025.

Dengan memperhatikan berbagai regulasi yang ada, kompleksitas permasalahan global, isue-isue pembangunan daerah, gaya kepemimpinan dan manajemen pembangunan daerah maka pemerintah daerah harus melakukan proyeksi dua puluh tahun yang akan datang. Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya diharapkan dapat menjadi sebagai *guideline* yang dapat meningkatkan penerapan *good governance* dan prinsip-prinsip *sustainable development* di segala aspek pembangunan daerah.

RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005–2025 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun kedepan yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya untuk setiap jangka waktu 5 tahunan. Perencanaan ini juga adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan memperhatikan potensi sumber daya yang tersedia. Dokumen perencanaan tersebut adalah bersifat makro yang memuat maksud dan tujuan, gambaran umum kondisi daerah, isu-isu strategis, visi dan misi, serta arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan proses penyusunannya dilakukan secara partisipasif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 ini merupakan kelanjutan dari dokumen perencanaan lainnya yang telah disusun sejak daerah ini terbentuk secara otonom, baik jangka menengah maupun tahunan. RPJP Kabupaten Nagan Raya yang substansinya memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan daerah dalarn kurun waktu dua puluh tahun yang akan datang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya memiliki karakteristik sebagai berikut : *pertama* lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategik dengan sasaran yang dinamis; *kedua* mengikuti kecenderungan baru; *ketiga* lebih berorientasi pada tindakan antisipatif.

Selanjutnya, RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. *Partisipatif dan Interaktif,* bahwa pelibatan *stakeholder* lebih mendorong terbangunnya rasa pemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar;
2. *Kesetaraan,* bahwa setiap kelompok masyarakat mendapat kesempatan dan informasi yang sama untuk berpartisipasi;
3. *Berwawasan kedepan,* bahwa orientasi pembangunan harus jelas sehingga dengan demikian berbagai pihak dapat mengantisipasi dan mengambil peran atau berkontribusi sesuai kepentingan masing-masing terhadap masa depan yang telah disepakati;
4. *Sesuai kerangka Fungsi dan Urusan Wajib Daerah*, bahwa RPJP ini merefleksikan secara konsisten fungsi dan urusan wajib serta urusan pilihan pemerintahan kabupaten untuk memastikan kesinambungan tindak lanjut implementasi arah pembangunan dalam RPJP ke dalam rencana strategis lima tahunan (RPJMK, Renstra SKPK) dan rencana tahunan (RKPK dan Renja SKPK); dan
5. *Singkat dan Padat,* bahwa *dokumen* RPJP yang akan menjadi dokumen perencanaan publik perlu terstruktur mengikuti kerangka logis perencanaan strategis, fokus dalam bahasa yang sederhana, dan informatif untuk memudahkan pemahaman *stakeholders,* memuat konsensus, dan penyepakatan hasil-hasilnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. RPJP Kabupaten Nagan Raya dapat memberikan arah kebijakan sekaligus menjadi acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan

dan pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

2. Menjadikan dokumen resmi daerah berwawasan jangka panjang dan visioner untuk pemangku kepentingan dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga pelaksanaan pembangunan Daerah tepat waktu dan tepat sasaran; dan
3. RPJP Daerah akan digunakan sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah lima tahunan sesuai dengan masa jabatan kepala daerah kabupaten, sehingga mempermudah Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan lima tahunan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan konsistensi dan keterkaitan perencanaan terpadu jangka panjang antara proses perencanaan dari bawah *(bottom up)* dengan perencanaan dari atas *(top down),* penganggaran, dan implimentasi program pembangunan daerah.
2. Sebagai alat ukur aspiratif dalam menjawab tantangan dan isu-isu strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan visi dan misi daerah;
3. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia dan pemberdayaan kelompok-kelompok rentan, Islami, mandiri, dan sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

4. Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya lokal secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.3 Landasan Penyusunan

RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 disusun atas dasar Landasan Idiel Pancasila, Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta merujuk ketentuan perundang-undangan lainnya sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias yang berisi tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Nagan Raya terintegrasi dengan tata ruang Provinsi Aceh
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.4 Hubungan RPJP Kabupaten Nagan Raya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan makro dan berwawasan jauh ke depan selama 20 tahun, RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 ini berkait erat dengan berbagai dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah. Dalam lingkup perencanaan nasional, RPJP Kabupaten Nagan Raya disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025. Sementara dalam lingkup daerah, RPJP Kabupaten Nagan Raya ini disusun dengan mengacu pada RPJP Aceh dan berpedoman kepada RTRW Kabupaten Nagan Raya serta memperhatikan RPJP dan RTRW Kabupaten perbatasan. Oleh karena itu, RPJP Kabupaten Nagan Raya merupakan bagian dari suatu sistem perencanaan nasional dan daerah yang saling bersinerji satu sama lain.

Penyusunan RPJP berpedoman kepada RTRW bertujuan untuk mengintegrasikan RTRW dengan rencana pembangunan serta menjamin selarasnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJP dengan arah kebijakan RTRW.

Selanjutnya, memperhatikan RPJP dan RTRW kabupaten perbatasan, dimaksudkan terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka panjang daerah antarkabupaten, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan kabupaten lainnya sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penyusunan

RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 yang memberikan gambaran mengenai wujud masa depan Kabupaten Nagan Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

Bab II **Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Nagan Raya**

Bab III **Analisis Isu-isu Strategis**

Bab IV **Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya**

Bab V **Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya**

Bab VI **Kaidah Pelaksanaan**

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN NAGAN RAYA

2.1 Sejarah

Jika ditelusuri sejarah perkembangan Kabupaten Nagan Raya, mulai Kesultanan Aceh, penjajahan Belanda dan Jepang, hingga masa kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari sejarah kabupaten induknya, yakni Kabupaten Aceh Barat. Pada masa kesultanan Aceh, mulai dari Sultan Saidil Mukamil (Tahun 1588-1604) hingga Sultan Iskandar Muda (tahun 1607-1636), di wilayah pesisir barat Aceh, termasuk Nagan Raya, cukup banyak masyarakat berketurunan Pidie. Saat itu, Sultan Iskandar Muda mendatangkan masyarakat dari Aceh Rayeuk dan Pidie di wilayah pesisir barat Aceh.

Di Akhir abad ke-17, wilayah Aceh Barat berkembang pesat dan berdirinya kerajaan kecil yang dipimpin Ulee Balang. Diantaranya yang berada di wilayah Nagan Raya mencakup *Seunagan, Tripa, Seuneu'am, dan Beutong.*

Dimasa penjajahan Belanda, masing-masing Uleebalang dapat menjalankan pemerintahan sendiri *(Zelfsbestuur)* atau swaparaja *(landschap)* yang diakui melalui suatu perjanjian (Korte Verklaring). Saat itu, Belanda membentuk Kerajaan Aceh menjadi *Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden* (Gubernemen Aceh dan Daerah Taklukannya). Selanjutnya, dibentuknya Gouvernement Sumatera, maka Aceh dijadikan Keresidenan terbagi atas beberapa wilayah, meliputi yang disebut *afdeeling* (propinsi) dan *afdeeling* dibagi terdiri atas beberapa *onderafdeeling* (kabupaten) dan *onderafdeeling* dibagi menjadi beberapa *landschap* (kecamatan).

Di masa Keresidenan Aceh, wilayah Keresidenan Aceh dibagi menjadi 4 (empat) afdeeling yang salah satunya adalah *Afdeeling Westkust van Atjeh* atau Aceh Barat dengan ibukotanya Meulaboh. *Afdeeling* tersebut meliputi wilayah

administratif sepanjang pantai barat Aceh, dari gunung Geurutee sampai daerah Singkil dan kepulauan Simeulue serta dibagi menjadi 6 (enam) *onderafdeeling*, termasuk salah satunya di Seunagan, Seuneu'am, dan Beutong, berada di Nagan Raya.

Di masa pendudukan Jepang, tidak mengalami perubahan yang signifikan struktur wilayah administrasi. Selanjutnya, pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan. Diantaranya 4 (empat) kecamatan, meliputi Seunagan, Kuala, Beutong, dan Darul Makmur berada di Nagan Raya.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Simeulue pada tahun 1996. Melalui Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000, Kabupaten Aceh Barat menambah 6 (enam) kecamatan baru sehingga memiliki 20 (dua puluh) kecamatan. Salah satunya, adalah Seunagan Timur, berada di Nagan Raya.

Kabupaten Nagan Raya memisahkan dari Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 2 Juli 2002, berdasarkan UU No.4 Tahun 2002. Kabupaten dengan ibukotanya Suka Makmue ini terbentuk definitif pasca diberlakukannya secara resmi Otonomi Daerah. Di awal pembentukannya, Kabupaten Nagan Raya terdiri 5 (lima) kecamatan, meliputi Seunagan, Seunagan Timur, Darul Makmur, Kuala, dan Beutong. Kata "Nagan" merupakan kependekan dari Seunagan yang menunjukkan lima kecamatan hasil pemekaran, sedang "Raya" berarti besar. Dimasa mendatang, diharapkan kelima kecamatan tersebut akan lebih berkembang.

Dalam perkembangannya, dari 5 kecamatan tersebut dimekarkan menjadi 8 kecamatan, berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya No.2 Tahun 2007. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Kecamatan Kuala dimekarkan menjadi Kecamatan Kuala Pesisir dan Kecamatan Tadu Raya. Sedangkan Kecamatan Seunagan dimekarkan menjadi Kecamatan Suka Makmue.

Sampai akhir tahun 2010, secara administratif Kabupaten Nagan Raya memiliki 8 kecamatan, 27 kemukiman, dan 222 gampong. Gampong paling banyak adalah di Kecamatan Darul Makmur (51 gampong), di samping juga Kecamatan Seunagan (35 gampong) dan Seunagan Timur (34 gampong). Sedangkan kecamatan lainnya, seperti Beutong (28 gampong), Tadu Raya (22 gampong), Suka Makmue (19 gampong), Kuala (17 gampong), dan Kuala Pesisir (16 gampong).

2.2 Geografis dan Demografi

2.2.1 Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang sedang tumbuh dan berkembang di Provinsi Aceh. Kabupaten yang terletak di pesisir pantai barat-selatan ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Barat dan terbentuk secara definitif pada tahun 2002. Secara geografis, Kabupaten Nagan Raya terletak antara $03^0 40'$- $04^0 38'$ LU dan $96^0 11' - 96^0 48'$ BT. Tinggi rata-rata 12 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 3.363,72 km^2 atau 336,372 hektar. Dengan posisi tersebut, Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan 4 kabupaten lainnya, yaitu Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya. Di sebelah utara, Nagan Raya berbatasan dengan Aceh Barat dan Aceh Tengah, sementara di sisi timur dengan Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya. Di bagian barat,

Nagan Raya juga berbatasan Aceh Barat dan Samudera Hindia, sedangkan di selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Kedudukan Kabupaten Nagan Raya yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai barat-selatan Aceh, dimaknai sebagai peluang strategis yang harus didayagunakan secara optimal. Nagan Raya harus berusaha keras menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat-selatan, di samping juga terus mengejar kemajuan pembangunan seperti yang dicapai Kabupaten Aceh Barat. Lebih lanjut, posisi Nagan Raya yang berbatasan dengan Aceh Tengah dan Gayo Lues, memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan komoditas hasil pertanian, industri pengolahan, pariwisata, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Posisi strategis Nagan Raya yang dikelilingi Samudera Indonesia, tepatnya di bagian selatan, terbukanya peluang yang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik antarwilayah pantai barat-selatan maupun dengan pusat pemerintahan Provinsi Aceh (Banda Aceh) dan Kabupaten Aceh Besar. Hal ini juga didukung dengan potensi sumberdaya pesisir dan kekayaan laut yang cukup menggembirakan yang diupayakan dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan *(sustainable development)* sehingga berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan wilayah pesisir.

Secara administrasi Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 10 kecamatan, 27 Kemukiman dan 222 gampong. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Beutong yang mencapai 1.323,06 Km^2 atau 39,33 Persen. Disusul Kecamatan Darul Makmur seluas 1.050,26 Km^2 atau 31,22 persen, Untuk 6 kecamatan lainnya luas wilayahnya masing-masing, meliputi Kecamatan Tadu Raya 8,58 persen, Seunagan Timur 7,69 persen, Kuala Pesisir 5,94 persen, Seunagan 4,16 persen, Kuala 2,10 persen dan Suka Makmue 0,97 persen.

2.2.2 Geomorfologi

Berdasarkan hasil perhitungan lahan yang relatif datar dengan kelas kemiringan 0-3 persen menempati areal seluas 52,49 persen, wilayah berombak dengan kemiringan 3-8 persen meliputi areal seluas 6,49 persen, bergelombang dengan kemiringan 8-15 persen seluas 11,02 persen, lahan hampir curam (gumuk-gumuk rendah) dengan kemiringan 15-25 persen meliputi areal sekitar 18,07 persen, lahan curam dengan lereng 25–40 persen menempati areal sekitar 11,2 persen dan kemiringan > 40 persen menempati areal seluas sekitar 0,73 persen dari luas Kabupaten Nagan Raya.

Menurut letak ketinggian, rata-rata wilayah Kabupaten Nagan Raya termasuk dataran rendah, artinya rata rata wilayah Kabupaten Nagan Raya berada antara 0 s/d 12 m dpl.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan lahan di Kabupaten Nagan Raya terdapat sekitar 52,49 persen atau sekitar 176,562 Ha merupakan kawasan daratan, dan sisanya terbagi atas beberapa kategori lahan. Kondisi geomorfologi yang sedemikian rupa juga berpengaruh pada kondisi letak gampong dan mata pencaharian penduduk. Dari 222 gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya, 168 berada di daerah dataran rendah, 26 gampong berada di daerah lerengan, 16 gampong di daerah lembah dan 12 gampong lagi berada di kawasan tepi pantai.

2.2.3 Klimatologi

Kabupaten Nagan Raya memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara $21,0^0$ C sampai $23,2^0$ C. Sedangkan untuk suhu terendah dan tertinggi bervariasi antara $18,0^0$ C hingga $22,0^0$ C dan antara $29,9^0$ C hingga $31,4^0$ C. Curah hujan Kabupaten Nagan Raya yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dien menunjukkan bahwa curah hujan yang terjadi selama tahun 1986 sampai dengan 1990 sebesar 3.579 mm. Curah hujan tertinggi terjadi

pada Bulan Januari, April, September, Nopember dan Desember, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 236 mm . Kelembaban udara di Kabupaten Nagan Raya dari data tahun 2004 - 2006 berkisar antara 85% - 87%. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada Bulan Desember dan terendah pada bulan Juni. Kecepatan angin bertiup antara 5 – 8 knots.

2.2.4 Hidrologi

Di Wilayah Kabupaten Nagan Raya mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti Krueng beutong, Krueng Nagan, Krueng Lamie, Krueng Seumayam dan Krueng Isep. Sebagai Daerah Hulu, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan sering terjadinya banjir pada musim penghujan. Kondisi ini (banjir) diperparah oleh karaktersitik wilayah di mana perbandingan panjang sungai dan perbedaan ketinggian (kontur) relatif curam, sehingga curah hujan yang terjadinya didaerah hulu (daerah atas) akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir (bawah). Secara umum banjir dan genangan air di wilayah Kabupaten Nagan Raya dapat diklasifikasikan sebagai banjir kiriman, banjir lokal dan banjir pasang (rob), khususnya kawasan yang berada sepanjang pinggir pantai. Wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki air tanah yang bersifat payau dan tawar. Daerah dengan air tanah payau terdapat pada bagian Selatan yang merupakan daerah pesisir. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian Barat, Timur dan Utara.

2.2.5 Litologi

Berdasarkan peta penyebaran jenis tanah, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya berjumlah 10 jenis tanah (Great Group Soils) menurut Taksonomi tanah tahun 1975 dan disetarakan dengan klasifikasi tanah menurut

sistem Dudal dan Supraptohardo Tahun 1960 yaitu : 1) Podsolik merah kuning, 2) Podsolik colklat, 3) Alluvial, 4) Grumosol, 5) Litosol, 6) Regosol, 7) Podsolik.

2.2.6 Potensi Wilayah Pengembangan

Berdasarkan penetapan Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Aceh dari sisi posisi geografis, Kabupaten Nagan Raya termasuk dalam wilayah pesisir barat I mencakup Meulaboh, Calang, dan Suka Makmue. Selanjutnya, menurut RTRW Kabupaten Nagan Raya, terdapat 4 (empat) satuan wilayah pengembangan (SWP), terdiri dari :

- SWP I mencakup wilayah Kecamatan Seunagan dan Suka Makmue dengan pusat pengembangan adalah Jeuram;
- SWP II meliputi wilayah Kecamatan Seunagan Timur dan Beutong dengan pusat pengembangannya di Kota Babussalam;
- SWP III mencakup wilayah Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir, dan Tadu Raya dengan pusat pengembangan di Ujong Fatihah; dan
- SWP IV meliputi wilayah Kecamatan Darul Makmur dengan pusat pengembangan di Alue Bilie.

2.2.7 Wilayah Rawan Bencana

Aceh berada di jalur penunjaman dari pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera (sumatera fault/transform) yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda yang dikenal dengan Patahan Semangko. Jika mengacu pada data geologis tersebut, Kabupaten Nagan Raya termasuk daerah yang rawan bencana karena berada di zona patahan aktif. Zona tersebut terdapat di wilayah bagian tengah bersamaan dengan kabupaten lainnya, meliputi Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan

Aceh Selatan. Hal ini tentunya Kabupaten Nagan Raya termasuk akan mengalami bencana geologis yang cukup panjang.

Bencana banjir juga berpotensi terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Potensi banjir tersebut terjadi karena merupakan limpasan dari sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Umumnya penyebab dari banjir tersebut adalah perusakan hutan di daerah aliran sungai, tidak berfungsinya drainase dengan baik, dan perubahan fungsi lahan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Nagan Raya adalah bersumber dari perilaku manusia atau aktivitas yang ditekuni oleh masyarakat itu sendiri. Bencana tersebut terjadi akibat faktor kelalaian, pengetahuan masyarakat yang rendah, ketidaktahuan, dan lainnya. Bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kebakaran, konflik sosial, dan pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah industri). Potensi rawan kebakaran seperti kebakaran hutan terjadi pada hutan-hutan yang dilalui jaringan jalan utama sebagai akibat perilaku manusia atau pengalihan fungsi lahan yang dilakukan melalui pembakaran lahan.

Bencana lainnya yang dapat merusak lingkungan dapat terjadi akibat penebangan liar yang dapat menggangu daerah tangkapan/resapan air *(cathment area)* sebagai penyangga banjir bandang. Sementara itu, penggalian dan penambangan pasir, batu krikil dan batu gunung untuk keperluan material konstruksi bangunan terus dilaksanakan dan diperkirakan juga penambangan tersebut sewaktu-waktu dapat menimbulkan bencana jika tidak ada pengendalian dari pemerintah daerah. Termasuk pula eksploitasi Sumber Daya Alam seperti penambangan Batu Bara di Alue Buloh dan penambangan emas di Beutong Ateuh serta pembangunan PLTU di Suak Puntong, diperkirakan akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas lingkungan hidup.

Bencana yang terjadi dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar

dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, hancurnya kawasan permukiman dan infrastruktur publik serta hilangnya aset produktif. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan strategi kebijakan dan upaya yang komprehensif dalam menanggulangi bencana. Simulasi dan sosialisasi, dalam mengantisipasi bencana sangat diperlukan masyarakat dalam rangka mengurangi resiko/dampak dari bencana.

2.2.8 Demografi

Penduduk berkualitas dan produktif merupakan tujuan utama dari pembangunan. Cita-cita untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan yang lebih merata, dan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera, akan terwujud apabila pembangunan dilaksanakan oleh penduduk yang memiliki sumberdaya yang terampil dan berdaya saing tinggi. Karena itu, potensi penduduk atau sumberdaya manusia (SDM) yang ada di Nagan Raya harus diberdayakan dan didayagunakan secara optimal agar perannya dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan cenderung meningkat. Jika tidak, dikhawatirkan penduduk atau SDM yang ada tersebut akan menjadi beban dan penghambat pembangunan di masa mendatang.

Perkembangan penduduk Kabupaten Nagan Raya cenderung fluktuatif. Kecenderungan semakin meningkat terjadi sepanjang tahun 2002-2004. Pada tahun 2002, penduduk yang mendiami di Nagan Raya berjumlah 142.519 jiwa. Angka tersebut naik drastis hingga mencapai 145.108 jiwa tahun 2004, atau rata-rata naik 0,60 persen/tahun. Imbas dari bencana tsunami di penghujung tahun 2004 lalu, penduduk yang mendiami di Nagan Raya telah menurun, yakni hanya tinggal 123.743 jiwa tahun 2005. Penurunan jumlah penduduk tersebut diakui akibat bencana tsunami, di samping disinyalir pula sebagian kecil penduduk telah berpindah ke daerah lain.

Sepanjang tahun 2006-2009, jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat signifikan, namun belum mampu mengimbangi yang pernah dicapai selama tahun 2002-2004. Hingga akhir tahun 2009, tercatat penduduk berjumlah mencapai 125.425 jiwa, sementara tahun 2006 berjumlah 123.953 jiwa. Sebaliknya, jumlah rumah tangga (RT) menunjukkan peningkatan signifikan kurun waktu 2002-2009. Rata-rata RT naik hampir 3,30 persen/tahun, dari 24.829 RT (tahun 2002) menjadi 30.482 RT (tahun 2009).

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dipastikan akan menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan. Hal ini mengingat distribusi penduduk yang relatif merata di setiap kecamatan. Kondisi tersebut memerlukan kebijakan dan perhatian khusus dari pemerintah. Jika saja terjadi kesenjangan pembangunan antarkecamatan diyakini akan terciptanya kantong-kantong kemiskinan, terutama di daerah pedalaman, yang akhirnya berdampak buruk terhadap kinerja ekonomi daerah.

Konsentrasi penduduk yang lebih banyak terdapat di Darul Makmur. Hampir 34,8 persen penduduk atau paling kurang 43.640 jiwa mendiami di Kecamatan Darul Makmur. Selain itu, jumlah penduduk yang cukup memadai terdapat pula di Kecamatan Kuala, yakni 16.239 jiwa (12,9 persen). Ironisnya, di Suka Makmue jumlah penduduknya tidak lebih 6,07 persen (7.612 jiwa). Padahal, Suka Makmue merupakan pusat pemerintahan Nagan Raya. Meski demikian, ditaksir ke depan penduduk yang menetap di Suka Makmue akan terus meningkat.

Dilihat dari sisi kepadatannya, rata-rata penduduk Nagan Raya masih belum sebanding luas wilayah. Selama tahun 2007-2009, rata-rata setiap kilometer persegi (km^2) masih di huni 37 jiwa, sementara kepadatan penduduk Provinsi Aceh rata-rata 72 jiwa/km^2 tahun 2007 dan hampir 75 jiwa/km^2 tahun 2009. Penduduk yang sangat padat terdapat di Kecamatan Suka Makmue dan Kuala, masing-masing hampir 234 jiwa/km^2 dan 230 jiwa/km^2. Padatnya

penduduk di kedua kecamatan tersebut cukup beralasan mengingat luas wilayahnya yang relatif kecil.

Sementara itu, beberapa kecamatan yang memiliki wilayahnya yang luas, justru memperlihatkan tingkat kepadatan penduduk yang masih jarang. Diantaranya, meliputi Darul Makmur, Beutong, Tadu Raya, Seunagan Timur, Seunagan, dan Kuala Pesisir. Wilayah yang luas tidak diimbangi dengan penduduk yang memadai mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi lokal.

Struktur penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Nagan Raya telah mengalami perubahan, dari laki-laki menjadi didominasi kaum perempuan. Bahkan, komposisi dan kecenderungan penduduk perempuan terus meningkat signifikan, khususnya pasca tsunami (periode 2005-2009). Sebaliknya, penduduk laki-laki sangat menonjol komposisinya dalam struktur penduduk Nagan Raya sebelum tsunami (tahun 2002-2004).

Data tahun 2002, menunjukkan bahwa penduduk laki-laki mencapai 50,16 persen dari keseluruhan penduduk Nagan Raya. Selanjutnya, naik dengan komposisi mencapai 50,54 persen tahun 2003 dan sebesar 50,53 persen tahun 2004. Sementara penduduk perempuan mencapai 50,21 persen tahun 2005, 50,20 persen tahun 2006, 50,20 persen tahun 2007, 50,21 persen tahun 2008, dan hampir mencapai 50,23 persen tahun 2009, dari total penduduk Nagan Raya.

Sejalan dengan pertambahan penduduk, jumlah penduduk usia produktif di Nagan Raya cenderung pula meningkat, khususnya selama 2005-2009. Namun, pertambahan tersebut belum mampu mengimbangi yang pernah dicapai tahun 2003. Tahun 2005, misalnya, tercatat penduduk usia produktif sebanyak 79.773 jiwa. Selanjutnya, terus naik secara signifikan hingga mencapai 81.097 jiwa tahun 2009. Sebaliknya, penduduk usia produktif pada tahun 2003 telah mendekati hampir 93.840 jiwa.

Kondisi yang tidak jauh beda dapat diamati pula pada penduduk usia non produktif (balita/anak-anak dan penduduk lanjut usia). Tahun 2003, jumlah penduduk usia non produktif lebih dari 50.145 jiwa. Angka tersebut jauh lebih tinggi ketimbang tahun 2009 (sebanyak 44.328).

Angka ketergantungan *(dependency ratio)* antara penduduk usia produktif dengan usia non produktif, terlihat sedikit meningkat. Tahun 2003 (sebelum tsunami), misalnya, angka beban ketergantungan sebesar 53,4. Itu artinya, dalam setiap 100 jiwa penduduk usia produktif menanggung beban penduduk non produktif sedikitnya 53 jiwa. Akhir tahun 2009, angka beban ketergantungan tersebut menjadi 54,6 (hampir 55 jiwa).

2.3 Syariat Islam

Provinsi Aceh yang sejak dulu dikenal penduduknya mayoritas (hampir 100 persen) beragama Islam dan dengan sadar melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Pelaksanaan Syariat Islam tersebut berlaku dan berkembang di seluruh daerah tingkat II (saat itu), termasuk Nagan Raya yang kini sebagai Kabupaten. Dalam perkembangan kehidupan bernegara yang penduduknya menganut aneka agama, maka secara bertahap melalui undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara khusus diresmikan. Pertama sekali lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, diikuti dengan Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan syariat islam di aceh (termasuk kabupaten Nagan Raya) telah dibentuk antara lain Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU), Mahkamah Syar'iah, Baitul Maal, Dinas Syariat Iislam dan Wilayatul Hisbah (WH). Melalui Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, mengisyaratkan bahwa diresmikannya peradilan bagi siapa saja yang melanggar tentang Syariat Islam di Aceh. Pada tahun 2003, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan pula 4 Qanun, terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam, yaitu Qanun Provinsi NAD Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyarawatan Ulama dengan Eksekutif, Legistatif dan lembaga lainnya, Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

Kaum ulama dalam pemerintahan di Aceh pada umumnya mempunyai peranan penting. MPU yang mewakili para alim ulama dan cendikiawan muslim, kedudukannya sejajar sebagai mitra pemerintahan dan legistatif. MPU yang bersifat independen memiliki fungsi dalam pembentukan pertimbangan positif terhadap berbagai kehidupan daerah, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, termasuk tata kelola ekonomi yang berbasis islam. Segala fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh lembaga ini menjadi rujukan pemerintah dalam menetapkan berbagai kebijakan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan dalam qanun-qanun Provinsi Aceh ataupun qanun-qanun Pemerintah Nagan Raya, selama ini telah melaksanakan Syariat Islam. Pemberlakuan Syariat Islam di daerah ini dicirikan dari berkembangnya majelis-majelis taklim, makmurnya masjid-masjid dan meunasah-meunasah serta berkembangnya kehidupan masyarakat disetiap pelosok yang bernuansa muslim dan muslimah di berbagai kehidupan sehari-hari.

Kendati demikian, palaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya relatif belum mencapai tingkat yang kaffah, disebabkan oleh beberapa kendala, seperti masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman Syariat Islam dari sebagian masyarakat. Hal ini melibatkan masih adanya kegiatan dan perilaku masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam. Pendidikan dan pengajaran agama di semua jenjang pendidikan umum belum maksimal, sehingga kaum muda belum benar-benar menghayati prinsip-prinsip dasar agama Islam. Mereka belum mampu meredam pengaruh budaya-budaya luar yang kadang-kadang merusak aqidah, moral, dan tata kehidupan yang Islami. Peranan teknologi modern yang sedianya memicu perkembangan dan percepatan pembangunan menjadi peluang bagi pengembangan kegiatan yang negatif yang berlanjut kepada kerusakan aqidah dan moral.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan strategis dan upaya percepatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dalam tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat serta mendorong kinerja ekonomi daerah yang berkualitas. Aktivitas ekonomi yang digeluti masyarakat kian berkembang dan menggeliat. Situasi daerah yang semakin damai dan kondusif pasca MoU Helsinki, diakui pula berimplikasi positif terhadap kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Sinyal positif tersebut tampak dari kecenderungan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2002-2009, pertumbuhan rata-rata kenaikan PDRB ADHB sangat tinggi, yaitu mencapai 16,15 persen setiap tahunnya. Awal tahun 2002, misalnya PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya masih berkisar Rp.835.825,32 juta. Nilai tambah

tersebut meningkat Rp.932.341,36 juta tahun 2003 dan mencapai Rp.1.128.094,11 juta tahun 2004. Akhir tahun 2009, tercatat PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya telah mencapai Rp.2.384.177 juta, jauh lebih tinggi dari tahun 2008 (Rp.2.233.497,89 juta), di samping yang dicapai tahun-tahun sebelumnya.

Dengan mengeliminir inflasi, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) cenderung fluktuatif, khususnya periode 2002-2009. Rata-rata pertumbuhannya masih relatif rendah dibanding PDRB ADHB, yakni sebesar 4,15 persen/tahun. Kurun waktu 2002-2004, PDRB ADHK bergerak naik secara signifikan, dari Rp.701.607,85 juta (tahun 2002) naik menjadi Rp.727.535,03 juta (tahun 2003) dan hingga mencapai Rp.820.199,13 juta (tahun 2004). Memasuki tahun 2005, nilai tambah tersebut telah merosot sebesar -3,89 persen dibanding tahun 2004, atau berjumlah Rp.788.273,76 juta. Merosotnya PDRB ADHK diakui akibat bencana tsunami yang melanda pesisir Aceh, termasuk Nagan Raya di penghujung tahun 2004 lalu. Sektor-sektor ekonomi potensial terkena imbasnya, seperti pertanian, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, jasa-jasa, bangunan, listrik dan air minum, industri pengolahan, dan pertambangan dan penggalian.

Pascatsunami, kondisi ekonomi daerah mulai menunjukkan pemulihan. Aktivitas ekonomi masyarakat cenderung bergairah dan berkembang kembali dari keterpurukan. Implikasinya, nilai tambah PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya naik drastis hingga ke posisi Rp.932.483,01 juta akhir tahun 2009. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari yang dicapai sebelum tsunami. Kemajuan yang dicapai tersebut sebagai wujud nyata kerja keras Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, di samping dukungan berbagai pihak, terutama BRR NAD-Nias dan masyarakat internasional yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami di Nagan Raya dan Aceh secara keseluruhan.

Di awal terbentuknya Kabupaten Nagan Raya tahun 2002, laju perekonomian daerah ini tumbuh sebesar 3,27 persen, masih lebih rendah

dibanding Kabupaten Aceh Singkil (3,36 persen), dan Provinsi Aceh (7,96 persen). Secara perlahan, aktivitas ekonomi terus menguat dan berkembang sehingga tumbuh sebesar 3,70 persen tahun 2003. Bahkan, pada tahun 2004 aktivitas ekonomi berkembang sangat cepat dengan laju pertumbuhan hampir 12,74 persen. Angka tersebut tergolong sangat tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional (6 persen) dan Provinsi Aceh (1,76 persen). Juga, masih jauh lebih tinggi dari yang dicapai kabupaten di wilayah pantai barat-selatan Aceh. Namun demikian, tahun 2005, kondisi perekonomian Kabupaten Nagan Raya merosot drastis dan terpuruk hingga ke posisi minus 3,89 persen. Sementara ekonomi Aceh masih tumbuh sebesar 1,22 persen.

Merosotnya pertumbuhan ekonomi tersebut sebagai imbas dari bencana tsunami sehingga beberapa sektor ekonomi potensial pendorong ekonomi daerah mengalami pertumbuhan melambat atau kolaps. Kecuali perdagangan, hotel, dan restoran, dan pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh positif, semua sektor ekonomi lainnya tumbuh negatif.

Memasuki tahun 2009, pergerakan ekonomi Nagan Raya belum menunjukkan pemulihan yang berarti, meski sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2005. Sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya terpuruk akibat bencana tsunami, kini produktif kembali sejalan dengan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sektor listrik dan air minum, di samping sektor bangunan/konstruksi adalah paling tinggi pertumbuhannya. Kedua sektor tersebut mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 44,31 persen dan 24,53 persen (tahun 2009). Hal tersebut sangat wajar mengingat intensitas pembangunan listrik, air minum, perumaham, jalan, jembatan, dan lainnya pascatsunami cenderung meningkat. Di sisi lain, pertanian sebagai leading sektor hanya tumbuh sebesar 8,28 persen. Sedangkan paling rendah pertumbuhaannya adalah industri pengolahan sebesar 1,79 persen. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Nagan Raya tahun 2009 tergolong rendah dibanding Nasional dan Aceh.

2.4.1.2 Pendapatan per Kapita

Tingkat kesejahteraan (taraf hidup) masyarakat Kabupaten Nagan Raya semakin membaik, jika diukur dengan pendapatan per kapita. Sesuai harga berlaku (ADHB), pertumbuhan kenaikan pendapatan per kapita sangat tinggi, yaitu rata-rata hampir 20,73 persen/tahun (periode 2002-2009). Awal tahun 2002, misalnya, pendapatan per kapita masyarakat Nagan Raya masih sebesar Rp.5,56 juta. Lalu, naik sebesar 10,25 persen tahun 2003 sehingga mencapai Rp.6,13 juta. Selanjutnya, pendapatan per kapita tersebut terus meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp.9,66 juta tahun 2005. Akhir tahun 2009, tercatat pendapatan per kapita paling kurang Rp.19,008 juta, naik drastis sebesar 21,58 persen dari tahun 2006 (Rp.11,75 juta).

Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan (ADHK), juga mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun, pertumbuhanya sedikit rendah dari ADHB, yakni rata-rata 8,56 persen/tahun. Sampai tahun 2009, pendapatan per kapita masyarakat mencapai Rp.7,59 juta, sementara tahun 2002 tidak lebih dari Rp.4,66 juta.

2.4.2 Kesejahteraan Sosial

2.4.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek paling pokok bagi masa depan suatu bangsa atau suatu masyarakat di suatu daerah karena berpengaruh langsung terhadap kualitas sumberdaya manusia. Mengingat pentingnya pendidikan yang berkualitas, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini sesuai dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni "*untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*".

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Nagan Raya telah memperlihatkan peningkatan yang cukup mengembirakan, kendati masih banyak juga kendala-kendala yang dihadapi. Kendala ini terutama menyangkut peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan, baik mutu anak didik maupun mutu tenaga pendidik, serta penempatan guru-guru di daerah terpencil.

Upaya untuk menuntaskan penduduk buta huruf di Nagan Raya diakui telah menunjukkan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai angka maksimal. Sepanjang empat tahun (2004-2007) terakhir, pencapaian angka melek huruf Kabupaten Nagan Raya masih di bawah rata-rata secara Nasional dan Provinsi Aceh. Mengutip data BPS, akhir tahun 2007 tercatat penduduk yang bisa baca-tulis di Aceh mencapai 96,2 persen, jauh lebih tinggi dari Nasional yang sebesar 91,87 persen. Sedangkan yang dicapai Kabupaten Nagan Raya tahun 2007 tidak lebih dari 89,7 persen. Tentunya ini menjadi tantangan Pemerintah Nagan Raya di masa mendatang, guna menuntaskan buta huruf secara cepat dan berkesinambungan melalui berbagai paket kebijakan inovatif dan program pembangunan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah membangun prasarana pendidikan mulai SD hingga SMA. Berdasarkan data tahun 2007, tercatat sarana pendidikan SD sebanyak 110 unit, meliputi 106 unit milik pemerintah dan 4 unit milik swasta. Dari keseluruhan SD tersebut telah menampung anak didik sebanyak 16.864 murid (SD Negeri) dan 302 murid (SD swasta), dengan jumlah tenaga pendidik (guru) sebanyak 1.429 orang (SD Negeri) dan 38 orang (SD swasta). Untuk SMP, semua kecamatan di Nagan Raya telah memiliki prasarana sekolah. Paling banyak terdapat di Darul Makmur (7 unit), sedangkan yang sedikit terdapat di Suka Makmue (1 unit). Secara keseluruhan jumlah SMP yang dikelola pemerintah sebanyak 24 unit, dengan 6.688 murid dan 339 guru. Sedangkan yang dikelola swasta sebanyak 3 unit, dengan 230 murid dan 20 guru. Di tingkat SMA, kecuali Suka Makmue, semua kecamatan di Nagan Raya telah memiliki prasarana SMA, dari 1 unit hingga 3 unit.

Kualitas guru sangat menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dinilai telah memiliki guru-guru yang layak mengajar. Di tingkat SD dan MI, tidak ditemui guru-guru yang tidak layak mengajar. Sedangkan guru yang semi layak mengajar sebanyak 30,76 persen dan layak mengajar telah mencapai 69,24 persen. Untuk SMP/MTs, guru yang tidak layak mengajar sebanyak 7,37 persen. Sedangkan guru SMA dan MA yang tidak layak mengajar masing-masing 0,83 persen dan 13,64 persen.

Beberapa indikator keberhasilan pendidikan menunjukkan hasil masih relatif menggembirakan di tahun 2007/2008, seperti angka putus sekolah dan angka lulusan. Misalnya, angka putus sekolah, di tingkat SD dan MI hanya sekitar 0,34 persen siswa yang putus sekolah. Di tingkat SMP dan MTs, angka putus sekolah cenderung lebih tinggi dari SD dan MI, yakni sekitar 8,18 persen. Sedangkan di tingkat SMA dan MA, angka putus sekolah sangat tinggi ketimbang SD/MI dan SMP/MTs, yaitu sebesar 18,73 persen. Sementara data Susenas 2008 (BPS), menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada tingkat SD/sederajat sebesar 0,67 persen, SMP/sederajat 7,13 persen, dan SMA/sederajat 6,74 persen. Berpijak Ke depan, perlu diupayakan agar tidak ada lagi anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya yang putus sekolah. Salah satunya upaya yang ditempuh adalah peningkatan pemberian beasiswa bagi anak didik yang berprestasi dan anak didik yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin.

Angka lulusan pada semua jenjang pendidikan, juga belum memuaskan. Di SMA/MA ditemui angka lulusan tidak lebih dari 36,45 persen. Itu artinya ada hampir 63,55 persen murid tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi (universitas). Kondisi yang tidak jauh beda ditemui di SMP/MTs. Sedangkan di tingkat SD/MI sedikit lebih baik dari SMA/MA dan SMP/MTs.

Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan, terutama dilihat dari sisi angka partisipasi kasar (APK). Sementara

angka partipasi murni (APM) terlihat semakin meningkat pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Sedangkan untuk tingkat SMA/MA semakin menurun. Sebagai gambaran, APK SD/MI mencapai 125,38 persen, SMP/MTs 102,68 persen, dan SMA/MA tidak lebih 60,36 persen. APM SD/MI mencapai 96,53 persen, SMP/MTs 101,62 persen, dan SMA/MA hanya 42,21 persen.

Data terakhir BPS, menyiratkan angka partisipasi sekolah cenderung lebih baik untuk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Sedangkan untuk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun masih relatif menggembirakan. Perempuan terlihat lebih tinggi angka partisipasi sekolah pada kelompok usia sekolah 13-15 tahun (SMP), sedangkan lainnya masih lebih rendah dibanding laki-laki. BPS juga mencatat, bahwa APM SD/sederajat di Nagan Raya mencapai 98,62 persen, lebih tinggi dari Aceh yang masih 96,04 persen. Pada tingkat SMP/sederajat dan SMA/sederajat, masing-masing APM Nagan Raya sebesar 72,35 persen dan 65,51 persen, sedangkan APM Aceh masing-masing 76,67 persen, dan 62,09 persen.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih dihadapkan tantangan yang cukup besar untuk mewujudkan kualitas SDM. Tantangan itu berupa tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Hampir 21,81 persen penduduk tidak punya ijazah SD dan berpendidikan tamatan SD/sederajat sebanyak 31,89 persen. Keadaan ini mesti dikhawatirkan mengingat penduduk usia tersebut juga menjadi bagian dari angkatan kerja. Demikian pula dengan penduduk yang mampu menamatkan pendidikan SMP/sederajat, terlihat masih cukup dominan, yakni 22,44 persen. Sementara itu, penduduk di Nagan Raya yang telah menamatkan pendidikan diploma I/II/III sebanyak 17,22 persen dan menamatkan sarjana/pascasarjana hanya 3,73 persen.

2.4.2.2 Kesehatan

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, disebutkan bahwa setiap orang berhak

mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, efektif, dan efisien. Karena itu, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas, adil, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan kesehatan secara adil, merata, berkualitas dan berkesinambungan. Dalam hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berupaya keras meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan (baik kualitas maupun kuantitas) serta mengoptimalkan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan. Patut dicatat, bencana tsunami tahun 2004 lalu telah merusak fasilitas kesehatan yang ada di Nagan Raya. Tercatat tidak kurang 11 unit prasarana kesehatan mengalami kerusakan, meliputi polindes 7 unit dan puskesmas pembantu 4 unit. Dari 11 unit tersebut, hanya 1 unit puskesmas pembantu rusak ringan, sedangkan lainnya harus dibangun kembali karena rusak total (8 unit) dan rusak berat (2 unit).

Untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan, hingga akhir tahun 2008, Kabupaten Nagan Raya telah memiliki 1 unit rumah sakit umum daerah (RSUD) kelas C yang terletak di Gampong Ujong Fatihah, Kecamatan Kuala. RSUD yang awalnya merupakan Puskesmas didirikan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan pihak Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) dan Caritas Switzerland. Pembangunan RSUD tersebut didanai Swiss Solidarity, Caritas Luxemburg, dan Caritas Spanyol. RSUD Nagan Raya yang di bangun di atas lahan seluas 4,7 ha diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2008, dan diharapkan nantinya menjadi pusat rujukan di Aceh.

Prasarana kesehatan lainnya yang ada di Nagan Raya, meliputi 10 unit puskesmas, 40 unit puskesmas pembantu (pustu), 17 unit puskesmas keliling (pusling), 71 unit polindes dan 250 unit posyandu. Sebelumnya di tahun 2006, jumlah puskesmas 10 unit, pustu 38 unit, dan posyandu 208 unit. Terdapat 2

kecamatan yang memiliki 2 unit puskesmas, meliputi Kuala Pesisir dan Darul Makmur. Sedangkan kecamatan lainnya masing-masing 1 unit puskesmas. Keseluruhan puskesmas tersebut telah mampu menangani pasien di ruang gawat darurat sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.

Rata-rata ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Nagan Raya sudah memadai. Misalnya, Polindes, untuk melayani 100.000 penduduk sudah tersedia paling kurang 52 unit (tahun 2008). Bahkan, bila dibandingkan dengan tahun 2007 mengalami peningkatan, dimana rasionya masih sebesar 23,36 unit per 100.000 penduduk. Sementara itu, rata-rata sarana kesehatan lainnya dalam melayani 100.000 penduduk, mencakup Puskesmas 7 unit, Pustu 27 unit, Pusling 13 unit, dan Posyandu 186 unit. Khusus untuk Puskesmas, rata-rata setiap Puskemas di Nagan Raya melayani masyarakat paling kurang 18.066 orang. Dibanding dengan rasio kecukupan Puskesmas secara nasional (28.000 penduduk per Puskemas), ketersediaan prasarana Puskesmas yang ada di Nagan Raya cukup memadai. Meskipun tahun 2006, rata-rata setiap puskesmas melayani masyarakat masih sebanyak 15.359 orang, atau rasio sebesar 8,07 per 100.000 penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan dan paramedis (dokter spesialis/ahli) yang memadai sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Distribusi para abdi kesehatan tersebut hingga saat ini masih relatif merata di setiap puskesmas. Data terakhir (2008), menyiratkan masih ada puskesmas yang belum memiliki dokter, seperti di puskesmas Cot Kuta, Uteun Pulo, Beutong, Simpang Jaya, dan Suka Mulia. Di Puskesmas Alue Bilie jumlah dokter sebanyak 4 orang, sedangkan puskesmas lainnya masing-masing 1 orang. Kekurangan dokter harus diantisipasi segera, mengingat jasa pelayanan abdi kesehatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

Disisi lain, jumlah perawat dan bidan sangat dominan di Nagan Raya. Tercatat perawat sebanyak 145 orang dan bidan mencapai 119 orang tahun

2008. Perawat paling banyak terdapat di Puskesmas Jeuram, di samping juga Puskesmas Padang Panyang. Di kedua puskesmas tersebut, termasuk Puskesmas Uteun Pulo ditemui pula paling banyak bidan, ketimbang puskesmas lainnya. Sedangkan tenaga kesehatan lainnya, seperti farmasi, gizi, kesehatan masyarakat (kesmas), sanitasi, dan teknisi medis berjumlah 99 orang.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya guna memperbaiki derajat kesehatan masyarakat kearah yang lebih baik. Disatu sisi upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun disisi lainnya masih perlu pembenahan dan peningkatan mutu pelayanan. Dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya (tahun 2008), menyebutkan angka kematian bayi *(Infant Mortality Rate/IMR)* hampir 29,01 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Itu artinya, dalam 1.000 bayi lahir hidup masih ditemui 29 bayi meninggal sebelum usia 1 tahun.

Kurun waktu 2005-2008, ada kecenderungan angka kematian bayi di Kabupaten Nagan Raya terus bertambah secara signifikan. Jika tahun 2005, tercatat bayi lahir meninggal sebanyak 8 bayi dan bayi meninggal sebanyak 6 bayi. Pada tahun 2006, angka kematian bayi meningkat hingga menjadi 14 bayi lahir meninggal dan 14 bayi meninggal. Akhir tahun 2008, paling kurang bayi lahir meninggal hampir 35 bayi, di samping bayi meninggal 27 bayi. Hal ini mengindikasikan bahwa belum sepenuhnya berhasil upaya-upaya yang telah dilaksanakan guna mengurangi angka kematian bayi di setiap kecamatan di Nagan Raya.

Selama empat tahun terakhir, perkembangan kelahiran bayi di Kabupaten Nagan Raya cenderung menurun. Pada tahun 2005 tercatat kelahiran bayi sebanyak 2.878 bayi. Selanjutnya tahun 2006, tercatat bayi yang lahir paling kurang 2.257 bayi. Angka tersebut turun drastis sebesar 27,51 persen (sebanyak 621 bayi) dibanding tahun 2005. Hingga akhir tahun 2008, angka kelahiran bayi di Kabupaten Nagan Raya berjumlah 2.317 bayi, masih terlihat jauh lebih rendah dibanding tahun 2005. Dari seluruh kecamatan yang

diamati, Darul Makmur masih merupakan kecamatan produktif kelahiran bayi. Meskipun turun drastis dibanding tahun 2005, namun jumlahnya hampir 34 persen (788 bayi) dari keseluruhan lahir bayi di Nagan Raya. Di susul Kecamatan Kuala 12,64 persen (293 bayi) dan Kecamatan Seunagan 10,62 persen (246 bayi).

Gizi buruk masih mengancam sejumlah balita di setiap kecamatan. Pada tahun 2008, tidak kurang dari 119 balita mengalami gizi buruk. Itu artinya sekitar 0,97 persen dari 12.206 balita. Tertinggi ditemukan di Kuala sebanyak 27 balita, disamping juga Darul Makmur (19 balita), Seunagan (19 balita) dan Beutong (18 balita). Balita gizi buruk juga ditemui di Seunagan Timur sebanyak 15 balita, Kuala Pesisir 10 balita, dan Tadu Raya 10 balita. Sedangkan di Suka Makmue hanya 1 balita mengalami gizi buruk. Upaya pelayanan kesehatan bagi balita harus terus ditingkatkan dan diawasi secara berkesinambungan, mengingat ancaman gizi buruk bisa saja terjadi setiap saat. Selain itu, karakteristik penyebab masalah gizi buruk multidimensi. Berbagai faktor, seperti kondisi sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat, disamping situasi politik yang kurang kondusif diakui turut pula mempengaruhi terjadinya gizi buruk bagi balita.

Oleh karena itu, penyuluhan dan bimbingan akan pentingnya gizi bagi balita, perilaku hidup sehat, dan pemeliharaan kesehatan lingkungan akan terus ditingkatkan, disamping pula memperluas layanan kesehatan dan mengupayakan menambah bantuan makanan bergizi bagi keluarga kurang mampu/miskin. Memastikan kelancaran distribusi dan ketahanan pangan di tingkat keluarga miskin, juga nilai sangat penting agar tidak terjadinya kekurangan gizi balita.

Kematian ibu maternal di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 5 orang tahun 2008, dan umumnya penyebab kematian adalah dimasa persalinan. Dibanding tahun 2006 yang sebanyak 2 orang, jumlah kematian ibu maternal tahun 2008 bertambah sebanyak 3 orang.

Dari sisi persalinan yang di bantu tenaga kesehatan, Kabupaten Nagan Raya telah mencapai kemajuan yang sangat menggembirakan. Pada tahun 2008, hampir 95,09 persen persalinan ditolong tenaga kesehatan, terutama bidan. Angka tersebut telah mencapai target pemerintah, yakni sebesar 90 persen. Ini merupakan kemajuan yang sangat menggembirakan karena proses persalinan merupakan fase krusial bagi ibu yang melahirkan maupun bagi bayi itu sendiri.

Berbagai upaya pembangunan kesehatan yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mampu meningkatkan angka usia harapan hidup masyarakat, kendati belum mencapai angka ideal. Tahun 2004, misalnya, angka harapan hidup masyarakat Nagan Raya sebesar 68,9 tahun, lebih tinggi dari Provinsi Aceh yang mencapai 67,9 tahun (BPS, BAPPENAS, UNDP, 2004). Selanjutnya, angka tersebut meningkat menjadi 69,1 tahun pada tahun 2005 (Aceh 68,0 tahun). Pasca tsunami, angka harapan hidup masyarakat Nagan Raya bergerak naik menjadi 69,2 tahun (tahun 2006) dan 69,31 tahun (tahun 2007), juga lebih tinggi dari rata-rata Aceh sebesar 68,3 tahun (tahun 2006) dan 68,40 (tahun 2007).

Meskipun angka harapan hidup masyarakat bergerak naik secara signifikan, kebijakan lanjutan dan inovasi-inovasi di sektor kesehatan guna meningkatkan derajat hidup kesehatan masyarakat, tetap dibutuhkan. Disamping mempertahankan kebijakan Askeskin atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang telah gulirkan selama ini, kebijakan kesehatan lainnya yang pro-miskin patut juga diupayakan dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti peningkatan bantuan makanan bergizi bagi bayi/balita, pelayanan gratis dan cepat bagi ibu hamil/ibu melahirkan, dan lainnya.

2.4.2.3 Tingkat Kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat hidup secara layak dan bermartabat harus terus dilanjutkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Diakui, bahwa selama ini telah diupayakan secara sungguh-sungguh berbagai program dan kegiatan pembangunan untuk mengatasi secara komprehensif masyarakat miskin. Namun, mengingat permasalahan masyarakat miskin sangat komplek sehingga diakui belum sepenuhnya teratasi secara optimal sehingga masih membutuhkan kebijakan strategis dan kebutuhan pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin *(pro poor).* Pemberdayaan masyarakat miskin dimaksudkan pula agar dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sepanjang tahun 2003-2009, perkembangan jumlah keluarga prasejahtera menunjukkan peningkatan, meskipun sedikit fluktuatif. Misalnya, tahun 2003 tercatat keluarga prasejahtera sebanyak 7.438 KK. Angka tersebut meningkat signifikan hingga mencapai 9.678 KK tahun 2006, dari sebelumnya 7.610 KK (tahun 2004) dan 9.570 KK (tahun 2005). Akhir tahun 2009, keluarga prasejahtera tercatat paling kurang 8.861 KK, sedikit menurun dibanding tahun 2007 dan masih jauh lebih tinggi dibanding tahun 2003.

Secara keseluruhan, keluarga yang tergolong prasejahtera dan sejahtera I cukup menonjol pada tahun 2009. Dari 33.980 KK, diantaranya sebanyak 26,07 persen (8.861 KK) merupakan keluarga prasejahtera dan 28,42 persen (9.568 KK) keluarga sejahtera I. Keluarga sejahtera II juga terlihat cukup menonjol, yaitu sebanyak 29,38 persen (9.983 KK). Sedangkan keluarga yang tergolong sejahtera III dan sejahtera plus, masing-masing tidak lebih 12,65 persen (4.300 KK) dan 3,47 persen (1.178 KK).

Kehidupan keluarga yang masih berada pada tahap memprihatinkan di temui relatif merata di setiap kecamatan. Konsentrasi keluarga prasejahtera

paling banyak terdapat di Kecamatan Darul Makmur, Tadu Raya, dan Kuala. Lebih dari 47,42 persen dari total keluarga prasejahtera di Nagan Raya bermukim di tiga kecamatan tersebut. Demikian pula dengan keluarga sejahtera I cukup dominan terdapat di Darul Makmur, yakni sebanyak 31,83 persen. Kedua terbanyak didapati di Kecamatan Beutong sebanyak 11,36 persen. Sementara itu, di Darul Makmur, Beutong, dan Seunagan Timur paling banyak bermukim keluarga yang tergolong sejahtera II. Sedangkan keluarga dengan tingkat kehidupan yang lebih mapan, juga didapati di Kecamatan Darul Makmur (48,89 persen), dari keseluruhan keluarga sejahtera plus.

2.4.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan pembangunan manusia yang diukur dari Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nagan Raya terus meningkat secara signifikan. Awal tahun 2004, tercatat IPM masih sebesar 65,5. Selanjutnya, angka IPM tersebut naik menjadi 66,3 (tahun 2005), sebesar 66,9 (tahun 2006), dan hingga mencapai 67,64 persen (tahun 2007). Sepanjang tahun 2004-2009, pembangunan manusia yang dicapai Nagan Raya memperlihatkan kemajuan yang cukup menggembirakan, dari status IPM menengah bawah menjadi menengah atas. Meskipun diakui, capaian IPM kurun waktu tersebut masih berada di bawah rata-rata Aceh dan secara nasional. Sebagai gambaran, angka IPM Aceh mencapai hampir 68,7 (tahun 2004), 69,0 (tahun 2005), 69,4 (tahun 2006), dan 70,35 (tahun 2007). Karena itu, perlu diupayakan terobosan program pembangunan manusia yang tepat dan berkualitas sebagai langkah untuk mencapai angka IPM yang lebih tinggi (IPM >80).

2.5 Pelayanan Umum

2.5.1 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena tenaga kerja berperan dalam proses produksi. Aktivitas ekonomi akan semakin tumbuh dan berkembang jika tenaga kerja yang ada mampu berkreatif dan berinovasi dalam mendayagunakan secara optimal sumberdaya ekonomi lokal. Tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja dipastikan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Di Nagan Raya, perkembangan angkatan kerja cenderung fluktuatif selama 2005-2009. Untuk tahun 2005-2007, angkatan kerja terus bertambah, dari 60.337 orang menjadi 60.679 orang. Memasuki tahun 2008, terjadi sedikit penurunan, hingga menjadi 60.302 orang, dan naik drastis hampir 61.398 orang tahun 2009. Selama periode 2005-2009, angkatan kerja di Nagan Raya rata-rata naik 0,42 persen/tahun. Dari total penduduk usia kerja, angkatan kerja mencapai 71,32 persen tahun 2005, sedangkan tahun 2009 sebesar 71,32 persen. Sementara dari total penduduk, angkatan kerja mencapai 48,95 persen.

Penduduk yang bekerja di Nagan Raya tahun 2009 sebanyak 51.190 orang, atau sekitar 60,63 persen dari total penduduk berumur 15 tahun ke atas (85.085 orang). Angka tersebut cenderung naik dibanding tahun 2005. Tercatat penduduk yang bekerja tahun 2005 tidak lebih dari 51.321 orang. Atau, sekitar 60,62 persen dari 84.653 orang berusia 15 tahun ke atas. Pertumbuhan rata-rata penduduk yang bekerja naik sebesar 42,06 persen/tahun (periode 2005-2009).

Pengangguran juga terlihat meningkat, rata-rata hampir 0,42 persen/tahun. Tahun 2005, misalnya, jumlah pengangguran sebanyak 9.056 orang (10,69 persen). Diantaranya sebanyak 5.241 orang sedang mencari pekerjaan dan 3.815 orang bersedia bekerja. Selanjutnya, angka pengangguran

telah mencapai 9.208 orang (10,69 persen) tahun 2009, terdiri atas 1.220 orang mencari pekerjaan dan 907 orang bersedia bekerja.

Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya menyebabkan terbatasnya penyerapan tenaga kerja dalam sektor ekonomi. Disisi lainnya, terbatasnya akumulasi investasi swasta/dunia usaha juga turut mempengaruhi terjadinya pengangguran. Oleh karena itu, pengangguran harus ditanggulangi dengan terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Jika tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial bagi daerah serta kehidupan masyarakat.

Dari sisi jenis kelamin, tahun 2009 tercatat sekitar 4.681 orang (50,84 persen) pengangguran adalah perempuan. Selebihnya sebanyak 4.527 orang (49,16 persen) adalah laki-laki. Dari kecamatan yang diamati, penduduk yang belum memiliki pekerjaan yang layak terdistribusi relatif merata di setiap kecamatan. Perempuan penganggur paling banyak terdapat di Kecamatan Darul Makmur, disamping Seunagan Timur dan Seunagan. Sedangkan laki-laki penganggur terutama terkonsentrasi paling banyak di Darul Makmur, Seunagan Timur, dan Tadu Raya.

Untuk tahun 2008, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Nagan Raya sebesar 65,61 persen, jauh lebih tinggi dari Provinsi Aceh yang sebesar 60,32 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,03 persen, sedangkan Aceh mencapai 9,56 persen. Data terakhir (BPS, 2008) mengungkapkan, bahwa hampir 54,29 persen pengangguran di Nagan Raya merupakan tamatan pendidikan menengah (SLTA) dan diploma/sarjana. Sedangkan sisanya sebanyak 45,71 persen merupakan tamatan pendidikan dasar (SD/SLTP).

Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Kabupaten Nagan Raya masih kurang menggembirakan. Mengutip data BPS 2008, pekerja dengan tingkat pendidikan dasar (SD dan SLTP) mencapai 55,49 persen. Bahkan, ditemui pula sebanyak 14,18 persen adalah pekerja tidak tamat SD. Sedangkan

yang berpendidikan menengah dan diploma/sarjana tidak lebih dari 30,33 persen.

2.5.2 Sarana dan Prasarana Umum

Kondisi kualitas ruas jalan kabupaten masih relatif menggembirakan di Nagan Raya. Data terakhir (2009), menyiratkan lebih dari 50,29 persen, atau sepanjang 190,0 km jalan masih dalam kondisi kerikil. Sebelumnya (tahun 2006), tercatat ruas jalan berkerikil mencapai 318,80 km (54,77 persen). Ruas jalan tanah juga cukup memadai, yakni sepanjang 65 km (17,21 persen). Sementara tahun 2006, ruas jalan permukaan tanah sepanjang 225,90 km (38,81 persen). Ruas jalan yang sangat nyaman dilalui kendaraan bermotor atau kondisi beraspal tidak lebih dari 36,75 km (9,72 persen) tahun 2009.

Kualitas jalan negara dan provinsi semakin menggembirakan di Nagan Raya. Seluruh ruas jalan negara dan provinsi sudah beraspal sehingga sangat nyaman dilalui pengguna jalan yang pada gilirannya juga memperlancar arus mobilitas orang, barang, dan jasa. Ruas jalan negara beraspál sepanjang 82,0 km dan jalan provinsi 117,60 km.

Jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah. Kondisi ruas jalan semakin baik di Nagan Raya, baik jalan negara, provinsi, maupun kabupaten. Hal tersebut semakin meningkatkan layanan transportasi darat yang efektif dan efisien. Akhir tahun 2009, jalan negara berkondisi baik sepanjang 82 km, jalan provinsi sepanjang 117,60 km, dan jalan kabupaten sepanjang 377,35 km. Untuk mendukung layanan trnasportasi darat, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melaksanakan pembangunan terminal yang terletak di Kecamatan Kuala. Dan, diharapkan tahun 2011 terminal tersebut sudah dapat melayani masyarakat.

Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Guna mewujudkan keinginan masyarakat bepergian dari Nagan Raya ke luar daerah, atau sebaliknya,

Kabupaten Nagan Raya telah memiliki Bandar Udara Cut Nyak Dhien di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir. Bandar udara ini hanya dapat disinggahi pesawat sejenis Fokker, dan belum mampu melayani pesawat berbadan besar sesuai kondisi landasan dan prasarana pendukungnya.

Dari informasi Bandar Udara Cut Nyak Dhien, tercatat frekuensi penerbangan yang datang di Bandar udara tersebut mencapai 1.006 kali dan berangkat 1.006 kali tahun 2009. Meskipun sedikit menurun ketimbang tahun 2006, namun aktivitas jasa penerbangan tersebut melonjak drastis, khususnya enam tahun terakhir. Tahun 2002, misalnya, frekuensi penerbangan hanya 686 kali, meliputi 343 kali datang dan 343 tiba. Aktivitas penerbangan tersebut naik drastis hingga mencapai 2.460 kali datang dan 2.460 kali berangkat tahun 2006.

Sebaliknya, minat masyarakat memanfaatkan jasa transportasi udara semakin meningkat. Jika tahun 2002, masyarakat bepergian ke luar daerah sebanyak 3.290 orang, akhir tahun 2009 naik hingga 8.998 orang. Demikian pula penumpang datang, naik mencapai 8.314 orang tahun 2008, dari 3.290 orang tahun 2006. Rata-rata setiap bulannya penumpang berangkat antara 677 orang hingga 837 orang. Sedangkan penumpang datang berkisar antara 600 orang hingga 778 orang per bulannya.

Kenaikan drastis penumpang terjadi selama tahun 2006-2008. Kondisi tersebut disinyalir sebagai imbas dari aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami. Para pelaku rehab-rekon (pemerintah, masyarakat internasional/NGO, pengusaha) lebih banyak memanfaatkan jasa penerbangan ketimbang jalur darat yang kurang efisien akibat rusak dari bencana tsunami di lintasan pesisir barat-selatan Aceh (Aceh Besar-Aceh Jaya-Aceh Barat).

Aktivitas bongkar dan muat barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien cenderung bertambah. Tercatat barang yang di bongkar tahun 2009 paling kurang 8.769 kg. Terbanyak dicapai bulan April (885 kg) dan bulan Juli (858 kg). Sedangkan bulan lainnya masih di bawah 800 kg. Tiga tahun sebelumnya,

barang yang di bongkar tidak lebih 8.270 kg. Sementara itu, barang yang di muat mencapai 1.206 kg (tahun 2009), cenderung turun di banding tahun 2006 yang berjumlah 8.998 kg. Paling banyak muatannya di bulan Oktober dan Nopember, yakni masing-masing 571 kg dan 269 kg. Di bulan lainnya barang yang di muat masih di bawah 100 kg.

Penggunaan handphone merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari saat ini. Disisi lain, telepon rumah juga masih diminati masyarakat sebagai sarana komunikasi. Mengutip data PT. Telkom Indonesia Divre I Sumatera area pelayanan Meulaboh, tercatat pemasangan baru sambungan telepon di Jeuram mencapai 1.977 sambungan tahun 2007. Sedangkan tahun 2009 tidak lebih dari 129 sambungan. Setiap bulannya hanya tersambung jaringan telepon berkisar antara 1 hingga 73 sambungan.

Selanjutnya, di Kabupaten Nagan Raya telah ada Kantor Pos sebanyak 5 unit, meliputi 1 unit di Kecamatan Seunagan Timur di Keude Linteng, Kecamatan Beutong, dan lainnya masing-masing 1 unit, seperti Darul Makmur (Alue Bilie), Kuala (Simpang Peut), dan Seunagan (Latong). Keberadaan kantor pos tersebut telah memberikan jasa layanan yang cukup berarti bagi masyarakat, terutama pelayanan pengiriman paket barang, surat, dan keperluan jasa lainnya. Pengiriman paket barang juga dilakukan perusahaan penumpang umum sejenis L-300 yang berpusat di Simpang Peut, Jeuram, dan Alue Bilie.

Pelayanan listrik di Kabupaten Nagan Raya dikelola PT. PLN (Persero) Wilayah I-Cabang Meulaboh. Jumlah pelanggan hingga posisi Desember 2007 meliputi Ranting Jeuram 6.207 pelanggan, Sub Ranting Simpang Peut 8.652 pelanggan, Sub ranting Alue Bilie 1.905 pelanggan, Sub Ranting Beutong 8.795 pelanggan, dan Sub Ranting Beutong Ateuh 292 pelanggan. Di banding awal Januari 2007, semua pelanggan listrik di unit ranting dan sub ranting meningkat tajam. Di unit Ranting Jeuram, tercatat masih 5.136 pelanggan di bulan Januari 2007. Seterusnya, Sub Ranting Simpang Peut 6.654 pelanggan, Sub

ranting Alue Bilie 1.405 pelanggan, Sub Ranting Beutong 7.309 pelanggan, dan Sub Ranting Beutong Ateuh 211 pelanggan.

Memasuki tahun 2009, jumlah pelanggan listrik di ranting Jeuram mencapai 30.293 pelanggan, meliputi ranting Jeuram 7.062 pelanggan, sub ranting Simpang Peut 10.202 pelanggan, sub ranting Alue Bilie 10.469 pelanggan, sub ranting Beutong 2.352 pelanggan, dan sub ranting Beutong Ateuh 208 pelanggan.

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan listrik dari tahun ke tahun kian meningkat, di samping meningkatkan kapasitas listrik yang belum optimal, kini Pemerintah sedang membangun PLTU di Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Pembangunan tersebut diperkirakan rampung tahun 2012 dengan kapasitas listrik 2x110 Megawatt (MW). Pembangunan PLTU Nagan Raya diwujudkan untuk mendukung stabilisasi distribusi antara wilayah pantai timur, tengah, dan pantai barat, serta wilayah selatan Aceh. Juga, merupakan bagian dari rencana pemerintah pusat untuk pengembangan listrik 10.000 MW di seluruh Indonesia.

2.5.3 Perdagangan

Sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir telah berimplikasi positif terhadap percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya. Meningkatnya aktivitas ekonomi juga diharapkan berimplikasi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah. Karena itu, berbagai potensi daerah yang berpeluang menghasilkan PAD agar terus didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Perdagangan, hotel, dan restoran termasuk lapangan usaha yang dapat diandalkan dalam jangka panjang menyerap lapangan kerja dan berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD. Berdasarkan data BPS, kontribusi nilai

tambah sektor perdagangan, hotel, dan restoran terhadap PDRB Kabupaten Nagan Raya terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan harga berlaku (ADHB), nilai tambah yang dihasilkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai Rp.326.306,48 juta tahun 2009, atau mencapai 13,69 persen. Sementara tahun 2004 kontribusinya tidak lebih dari Rp.213.321,40 juta. Demikian pula berdasarkan harga konstan (ADHK), kontribusi nilai tambahnya cenderung bertambah, dari sebesar Rp.178.635,35 juta (tahun 2004) menjadi Rp.221.541,40 juta (tahun 2009).

Aktivitas perdagangan terus menggeliat dan berkembang di Kabupaten Nagan Raya. Sarana ekonomi yang sangat berperan penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat terus tumbuh. Berkembangnya sarana ekonomi tersebut disinyalir akan mendorong peningkatan penerimaan daerah, khususnya bersumber dari PAD. Hingga akhir tahun 2009, tercatat sarana ekonomi, meliputi mini market 4 unit, kedai makan/minum 425 unit, tokjmo kelontong 1.328 unit, dan restoran/rumah makan 29 unit.

2.6 Daya Saing

Kemampuan daya saing didukung oleh dua keunggulan (comparatif) yaitu keunggulan potensi sumber daya manusia dan keunggulan potensi sumber daya alam. Namun, keunggulan kedua potensi ini belum memiliki keunggulan untuk maju dan berkembang jika tidak diikuti oleh daya saing (comperatif) yang unggul. Kemampuan daya saing adalah kemampuan dalam menciptakan kualitas dari kedua potensi tersebut.

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup, serta memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi. Pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang keahlian. Pemberlakuan otonomi daerah akan memberi peluang yang lebih besar bagi

memanfaatkan seluruh wewenang yang diberikan guna meningkatkan kemampuan daerah di berbagai sektor.

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar di sektor pertanian khususnya di sektor perkebunan diikuti oleh sektor perikanan. Keunggulan ini diperlihatkan oleh nilai PDRB Nagan Raya, dimana lebih dari 50% setiap tahunnya berasal dari sektor tersebut. Berkembangnya sub sektor perkebunan di daerah ini, akan mendorong perkembangan industri pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi kedua sektor tersebut, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah Nagan Raya.

Masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami, telah membuka peluang yang luas bagi para investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya di Nagan Raya. Peluang tersebut didukung pula oleh lokasi yang strategis serta kekayaan alam yang melimpah yang dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi para investor. Kekayaan alam tersebut meliputi kekayaan di sektor pertanian (perkebunan) perikanan dan kelautan yang sangat potensial.

Kabupaten Nagan Raya satu-satunya daerah penghasil kelapa sawit terbesar di kawasan pantai barat Aceh dipandang sangat memungkinkan untuk dibangunnya industri hilir di sub sektor perkebunan sawit. Peluang-peluang ini merupakan modal paling berharga bagi meningkatkan sumber daya saing daerah. Mengutip data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, luas areal yang ditanami kelapa sawit terus meningkat selama tujuh tahun terakhir. Awal tahun 2003, misalnya, areal yang ditanami kelapa sawit kurang lebih 12.747 ha. Sementara tahun 2009 telah mencapai hampir 27.238 ha. Sejalan dengan pertambahan luas lahan, produksi juga cenderung meningkat, meskipun sedikit fluktuatif dari tahun ke tahun. Hingga akhir tahun 2009, tercatat produksi kelapa sawit sebanyak 82.238 ton, dan rata-rata per

hektarnya 3,01 ton. Angka produksi tersebut melonjak drastis ketimbang tahun 2003 yang masih 57.182,8 ton dan rata-rata per hektarnya 4,49 ton.

Lahan kelapa sawit yang paling luas terdapat di lima kecamatan, meliputi Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Beutong, dan Tadu Raya. Di empat kecamatan tersebut luas areal kelapa sawit hampir 95,66 persen (27.022 ha) dari keseluruhan Nagan Raya. Sedangkan yang relatif kecil luas areal tanaman sawit terdapat di Kecamatan Seunagan Timur. Di Darul Makmur produksi kelapa sawit mencapai 53.335 ton (64,9 persen), atau paling tinggi dari produksi kecamatan lainnya. Disusul Tadu Raya sebanyak 22.794 ton (27,7 persen), Beutong 2.698 ton (3,28 persen), Kuala 1.460 ton (1,78 persen), dan Kuala Pesisir 1.460 ton (1,78 persen).

Selain kelapa sawit, karet juga merupakan komoditas perkebunan unggulan di Nagan Raya. Luas areal yang sudah ditanami karet mencapai 9.617 ha tahun 2009. Dari luas lahan tersebut dicapai produksi sebanyak 3.929 ton. Enam tahun sebelumnya, lahan yang ditanami karet seluas 8.162 ha, dengan produksi 5.552 ton. Tingkat produktivitas karet masih relatif rendah, rata-rata per hektarnya masih di bawah dari 1 ton. Semua kecamatan di Nagan Raya menanami karet sebagai sumber penghasilan masyarakat. Paling luas ditanami masyarakat di Kecamatan Beutong, di samping juga Kecamatan Seunagan Timur, Darul Makmur, dan Seunagan. Secara keseluruhan, luas tanam komoditi karet mencapai 9.617 ha dan produksi mencapai 2.794 ton (kondisi tahun 2009).

Selain usaha tani kepala sawit dan karet, terdapat juga perkebunan rakyat kelapa dalam dengan sentra produksi terbesar adalah Kecamatan Kuala dan Kuala Pesisir. Perkembangan luas tanam dan produksi komoditi ini juga tergolong fluktuatif selama tahun 2003-2009. Tahun 2003, tercatat luas lahan yang ditanami kelapa dalam 2.371 ha, dan selanjutnya naik menjadi 6.733 ha tahun 2007. Tahun selanjutnya terus menurun luas tanamnya hingga 1.588 ha tahun 2009.

Imbas dari fluktuasinya luas tanam, produksi juga cenderung naik dan turun selama tujuh tahun terakhir. Produksi tertinggi dicapai tahun 2007, yakni hampir 5.103 ton, dengan tingkat produktivitas rata-rata 7,95 ton/ha. Sedangkan produksi yang dicapai tahun 2009 tidak lebih dari 780 ha, dengan rata-rata per hektarnya 0,49 ton. Itu artinya, tergolong sangat rendah dibandingkan produksi yang telah dicapai selama enam tahun terakhir.

Kakao juga sangat diminati masyarakat di Nagan Raya. Sepanjang tahun 2003-2007, budidaya kakao berkembang drastis. Hal tersebut tercemin dari pertambahan luas tanamnya, dari 718 ha (tahun 2003) menjadi 6.484 ha (tahun 2007). Memasuki tahun 2008, luas tanam kakao sedikit menurun, dan kembali sedikit meningkat pada tahun 2009. Meski demikian, masih terlihat lebih rendah dibanding yang dicapai tahun 2007.

Tingkat produktivitas lahan budidaya kakao masih terlihat rendah, meskipun perkembangan luas tanam cukup menonjol. Semua kecamatan terlihat produktivitasnya masih dibawah rata-rata 1 ton/ha. Areal paling luas ditanami kakao terdapat di Kecamatan Darul Makmur, yaitu 1.789 ha (49,3 persen). Dari luas lahan tersebut dicapai produksi sebanyak 868 ton (68,6 persen). Sedangkan yang relatif kecil luas lahannya ditemui di Kecamatan Suka Makmue.

Potensi peternakan di Kabupaten Nagan Raya cukup menggembirakan. Kecuali didukung ketersediaan lahan yang memadai, juga bahan baku untuk pakan ternak mudah diperoleh. Jenis ternak yang dipelihara masyarakat, seperti kerbau, sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam pedaging, dan itik. Dalam tujuh tahun terakhir, perkembangan populasi ternak sangat bervariasi, ada yang cenderung meningkat dan ada pula fluktuatif. Untuk jenis ternak besar, kerbau, misalnya, terlihat meningkat populasinya pada tahun 2006, yaitu menjadi 29.608 ekor, dari tahun 2003 yang sebanyak 23.917 ekor. Akhir tahun 2009, populasi kerbau di Kabupaten Nagan Raya tidak lebih dari 12.269 ekor, turun drastis dibanding tahun 2006.

Ternak besar lainnya, khususnya sapi sebanyak 11.084 tahun 2009. Angka populasi tersebut meningkat drastis dibanding tahun 2003 yang sebanyak 10.336 ekor. Namun, masih terlihat lebih rendah dibandingkan tahun 2005. Tercatat populasi kerbau pada tahun 2005 hampir 15.314 ekor.

Seperti halnya ternak besar, perkembangan ternak kecil (kambing dan domba) menunjukkan fluktuatif selama tujuh tahun terakhir. Populasi kedua jenis ternak tersebut cenderung naik dan turun sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi pendapatan peternak. Akhir tahun 2009, tercatat populasi kambing di Kabupaten Nagan Raya sedikitnya 16.487 ekor. Padahal, tahun 2006 populasinya mencapai 71.332 ekor, dan tahun 2003 telah dicapai hampir 57.174 ekor. Jenis ternak domba juga demikian, turun drastis dari 11.530 ekor tahun 2003, menjadi 5.058 ekor tahun 2009. Padahal, tahun 2006 populasinya telah mencapai 16.041 ekor.

Selain ternak besar dan ternak kecil, terdapat pula ternak unggas berupa ayam buras, ayam ras, dan itik. Pemeliharaan ayam buras dan itik semakin berkembang, dan populasinya terus bertambah secara signifikan. Sampai tahun 2009, populasi ayam buras mencapai 640.595 ekor, dari tahun 2003 yang masih sebanyak 606.974 ekor. Populasi itik tidak lebih dari 134.145 ekor tahun 2003, sedangkan tahun 2009 telah naik drastis hingga mencapai 200.808 ekor. Sementara populasi ayam ras cenderung naik dan turun (fluktuatif) selama tujuh tahun terakhir.

Kabupaten Nagan Raya termasuk salah satu wilayah pesisir di Aceh. Kabupaten ini diapit dan dikelilingi Samudera Indonesia di bagian selatan. Dengan posisi tersebut, diyakini Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi kekayaan laut cukup memadai yang dapat didayagunakan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berperan strategis dalam mendorong perekonomian wilayah.

Selama tujuh tahun terakhir, produksi perikanan laut di Nagan Raya cenderung fluktuatif. Awal tahun 2003, tercatat produksi perikanan laut

sedikitnya 1.007 ton dengan nilai produksi hampir Rp.4,37 milyar. Akhir tahun 2009, nilai produksi perikanan laut tercatat Rp.5,27 milyar dan produksi sebanyak 1.017 ton.

Untuk perikanan budidaya, hasil budidaya air tawar sangat mendominasi dan produksinya mencapai 2.772 ton tahun 2009. Hasil laut mencapai 1.457,2 ton, perairan umum 67,9 ton, dan air payau 23 ton (kondisi tahun 2009). Luas areal perairan umum yang dimanfaatkan petani ikan untuk menghasilkan komoditi perikanan mencapai 4.802,75 ha. Diantaranya, paling menonjol adalah rawa seluas 2.11,75 ha dan sungai 2.533 ha.

Sektor perikanan dan kelautan telah memberikan sumber nafkah penting bagi nelayan dan petani ikan di Kabupaten Nagan Raya. Hingga akhir tahun 2009, tercatat nelayan sebanyak 1.336 orang dan petani ikan 900 orang. Sementara tahun 2003, jumlah nelayan di Nagan Raya mencapai 1.540 orang dan petani ikan 1.348 orang.

BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang dan Focus Group Discution (FGD) yang telah dilaksanakan, diperoleh gambaran bahwa yang menjadi permasalahan dan tantangan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan di Kabupaten Nagan Raya yang harus diatasi secara komprehensif, integratif, dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. **Fungsi Pelayanan Umum** yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
   - Pelayanan pemerintahan, meliputi : perbaikan prosedur perizinan, pembuatan KTP, Akte Kelahiran dan dokumen lainnya: pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat; dan perbaikan sistem dan manajemen pemerintahan.
   - Syariat Islam, meliputi : penerapan dan penegakan nilai-nilai Islam; dan pendidikan Syariat Islam sejak dini sosialisasi kebijakan dan penegakan sangsi / hukum.
   - Kepegawaian, meliputi : rekruitment pegawai secara transparan dan sesuai standar; peningkatan kualitas SDM yang profesional; penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku peningkatan kesejahteraan/penghasilan.
   - Akses informasi, meliputi : akses akan produk qanun; Rencana Tata Ruang dan dokumen lainnya yang mengedepankan sosialisasi dan penyebaran informasi.

2. **Fungsi perumahan dan fasilitas umum** yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
   - Pekerjaan umum, meliputi : pembangunan jalan, jembatan, drainase, tanggul, pintu air, rumah pompa. Pelebaran jalan/peningkatan/pemeliharaan dan penambahan akses jalan baru, pendataan serta penataan jalan yang sudah ada.
   - Perumahan rakyat, meliputi : pembangunan prasarana penunjang perumahan, penataan lingkungan permukiman terutama di daerah yang terkena tsunami.

3. **Fungsi lingkungan hidup dan penataan ruang** yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
   - Tata ruang, meliputi : pemanfaatan dan penataan ruang serta pengembangan wilayah; tersusunnya RTRW Kota sampai pada tingkat desa (*village plan*). Sosialisasi dan penyebaran informasi qanun, penerapan sangsi, ketegasan bertindak.
   - Lingkungan hidup, meliputi : limbah rumah tangga, polusi udara, persampahan, penghijauan, intrusi air laut, banjir, rawan gempa, penurunan permukaan tanah. Sosialisasi dan penyebaran informasi efek pencemaran lingkungan.

4. **Fungsi pendidikan** yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
   - Peningkatan pelayanan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, meliputi :
     - penyediaan tenaga guru yang berkualitas;
     - dilandasi profesi pengelolaan pendidikan di sekolah dan meningkatkan peran serta masyarakat;
     - peningkatan mutu pendidikan dan tingkat kelulusan siswa.

- menggunakan / penerapan sistim penjaringan pengujian bakat pada skala penerimaan siswa baru.

- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, meliputi : perbaikan gedung sekolah yang rusak; penyediaan buku bacaan yang optimal di tiap sekolah; pengembangan laboraturium; data base pendidikan.
- Perencanaan dan pengawasan pendidikan, meliputi : pengembangan kurikulum; penyusunan program-program pendidikan secara partisipatif dan berkelanjutan, adanya fit and proper test dalam pengangkatan kepala sekolah serta adanya laporan sekolah yang dipublikasikan.
- Peningkatan peran serta partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah.
- Peningkatan program luar sekolah yang dapat mengurangi angka pengganggguran akibat putus sekolah dan sudah melewati wajib belajar.

5. **Fungsi ekonomi** yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
   - Pemberdayaan ekonomi lokal, meliputi : akses keuangan untuk pengembangan, industeri rumah tangga, usaha kecil dan menengah.
   - Pengembangan pusat perdagangan, meliputi : penertiban lokasi perdagangan yang sesuai tata ruang, perencanaan pembangunan pusat pusat perbelanjaan baru.
   - Ketenagakerjaan, meliputi : pelatihan tenaga kerja dan penyediaan *data base* ketenagakerjaan serta penyediaan lapangan kerja.
   - Perikanan dan kelautan, meliputi : perbaikan tambak dan bantuan peralatan tangkap, fishing ground management modal usaha.
   - Perindustrian, meliputi : pengembangan industri rumah tangga dan industri perikanan.

6. **Fungsi kesehatan** yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
   - Peningkatan pelayanan kesehatan, meliputi : pelayanan rumah sakit, puskesmas, pustu, polindes, pusling dengan prasarana dan sarana kesehatan yang canggih dan lengkap agar pelayanan kesehatan untuk masyarakat lebih baik, akurat, dan cepat.
   - Tenaga medis/kesehatan, meliputi : penyediaan tenaga medis, dokter spesialis, bidan dan perawat yang handal dan profesional.
   - Penyuluhan kesehatan, meliputi : sosialisasi tentang hidup bersih dan sehat, serta keluarga berencana.
   - Perilaku hidup sehat, meliputi : kesadaran hidup sehat dan lingkungan bersih.

7. **Fungsi perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat** yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
   - Pemberdayaan perempuan, meliputi : pemberian kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan tanpa melanggar nilai-nilai Islam.
   - Perlindungan anak dan manula, meliputi : perlindungan anak dibawah umur; jaminan sosial bagi manula.
   - Bantuan sosial, meliputi : penanganan penyandang masalah sosial (pengemis, gelandangan, cacat, fakir miskin, dan lainnya).

8. **Fungsi pariwisata dan kebudayaan** yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
   - Kebudayaan, meliputi : penerapan dan pelestarian adat istiadat; kesenian rakyat.

- Pariwisata, meliputi : pengembangan wisata yang bernuansa Islami; pemeliharaan benda-benda bersejarah; wisata tsunami serta sosialisasi dan pemberian informasi kepariwisataan.

9. **Fungsi ketertiban dan ketentraman** yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera dibenahi, antara lain :
   - Penerapan hukum, meliputi : penerapan peraturan yang mencerminkan budaya Aceh dan dilapangan harus benar-benar dilaksanakan dengan baik tanpa kecuali; penerapan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran hukum, penertiban produk-produk hukum/qanun yang tidak mencerminkan kepentingan dan budaya Aceh.

3.2 Analisis Isu-isu Strategis

1. Pemantapan dan Penegakan Syariat Islam

Nilai-nilai Islami belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Syariat, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam masih belum sempurna. Pasca tsunami, Aceh pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada khususnya merupakan daerah yang terbuka bagi masyarakat internasional serta derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi merupakan faktor eksternal. Hal ini menjadi tantangan masyarakat Nagan Raya untuk dapat mempertahankan jati diri sebagai masyarakat yang islami. Selama ini pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi cenderung merusak jati diri. Karenanya perlu dilakukan pemantapan akidah dan pemahaman Syariat untuk meningkatkan ketahanan *(resistent)* budaya dan kecerdasan masyarakat terhadap infiltrasi budaya asing termasuk gerakan pendangkalan akidah. Ketahanan dan kecerdasan ini perlu ditingkatkan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

2. Kemiskinan, Pengangguran, dan Disparitas Wilayah

Kemiskinan merupakan isu strategis nasional dan daerah yang harus ditanggulangi secara komprehensif dan berkelanjutan. Meskipun cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun secara statistik persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya masih tergolong tinggi yang melebihi angka rata-rata Nasional dan Provinsi Aceh. Kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan semata tetapi juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, masalah kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kondisi tersebut mengindikasikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya masih memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari pembuat kebijakan dan seluruh pemangku kepentingan. Masalah kemiskinan merupakan hal mendasar yang harus ditangani secara menyeluruh dan berkesinambungan. Karena itu, diperlukan dukungan dan peran aktif semua pihak untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Dengan demikian, visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya akan dapat diwujudkan 20 tahun ke depan.

Terbatasnya investasi di daerah dan belum adanya keterkaitan yang kuat antarsektor pembangunan, khususnya pertanian dan industri pengolahan menyebabkan pula terbatasnya lapangan kerja di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, iklim usaha yang relatif kondusif dan kebijakan investasi yang masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh sesuai implimentasi UU No.11 Tahun 2006 turut menghambat arus investasi di Kabupaten Nagan Raya. Implikasinya, masih ditemui angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan secara layak. Masalah pengangguran akan terus diupayakan diatasi secara bijak dan tepat serta menjadi prioritas selama 20

tahun ke depan di Kabupaten Nagan Raya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan memastikan dan berusaha menyediakan kesempatan kerja yang seluasnya bagi tenaga kerja terampil, inovatif, dan kreatif di segala bidang pembangunan.

Isu strategis lainnya adalah disparitas antarwilayah di Kabupaten Nagan Raya. Relatif meratanya pembangunan antarwilayah telah menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan, terutama di gampong-gampong tertinggal. Terbatasnya.anggaran pemerintah, salah satunya merupakan pemicu tidak semua daerah mendapat pembangunan infrastruktur dan pelayanan pembangunan sosial-ekonomi. Ketimpangan antarwilayah akan ditanggulangi melalui penyediaan infrastruktur yang representatif yang bersumber dana dari pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Diupayakan pula melalui pinjaman lunak dan mengandalkan investasi swasta yang diharapkan dalam jangka panjang disparitas pembangunan antarwilayah dapat diatasi secara berkelanjutan.

3. Rendahnya Daya Saing dan Kualitas Pembangunan Manusia

Sejalan dengan globalisasi dan Otonomi Daerah, tingkat persaingan di tingkat global, regional, dan nasional semakin kompetitif. Setiap daerah terus berlomba dan melakukan berbagai inovasi yang kreatif untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif demi mendorong pertumbuhan ekonominya. Karena itu, perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan perekonomian di masa mendatang di Kabupaten Nagan Raya. Daya saing merupakan indikator kunci agar Kabupaten Nagan Raya dapat menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, infrastruktur dan sumber daya manusia yang mempunyai produktifitas tinggi serta kepastian hukum harus menjadi prioritas strategi jangka panjang.

Tingkat daya saing sumberdaya manusia Kabupaten Nagan Raya yang diukur dari perbandingan tenaga kerja berpendidikan tinggi dengan jumlah penduduk masih sangat timpang. Itu artinya, kualitas tenaga kerja di Kabupaten

Nagan Raya masih relatif menggembirakan. Dari sisi produktivitas ekonomi, yang diukur dari angka ketergantungan *(dependency ratio)* antara penduduk usia produktif dan non produktif juga relatif tinggi. Kondisi ini diperkirakan dalam jangka panjang dapat menghambat percepatan pembangunan daerah akibat pengelolaan sumberdaya ekonomi lokal yang cenderung tidak optimal. Rendahnya kualitas keahlian dan keterampilan tenaga kerja menyebabkan pula kesulitan dalam meraih peluang-peluang strategis kesempatan kerja serta akan menghadapi tantangan kerja yang lebih berat sesuai dengan perkembangan dan dinamika global.

Pembangunan manusia menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang di Kabupaten Nagan Raya. Kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) relatif menggembirakan, meskipun cenderung mengalami perbaikan setiap tahunnya. Saat ini kedudukan pembangunan manusia Kabupaten Nagan Raya termasuk kategori menengah atas. Karena itu, terobosan kebijakan dan program pembangunan manusia yang inovatif akan terus digulirkan demi mencapai pembangunan manusia berkualitas dan menempati kategori tinggi (IPM 0,80).

Disisi lainnya, upaya peningkatan kualitas SDM sebagai tindak lanjut dari perbaikan daya saing tidak hanya berkutat secara kuantitas, namun akan lebih difokuskan secara kualitas. Perbaikan tersebut diupayakan melalui penguatan pendidikan berkualitas di semua jenjang pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha serta memperluas kesempatan magang, pelatihan dan studi lanjut.

4. Kerawanan Pangan dan Gizi

Ketahanan pangan dan gizi merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengingat pangan dan gizi berkait langsung dengan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, pangan memiliki dimensi yang sangat

komplek, termasuk dari sisi sosial, ekonomi, dan politik serta berhubungan erat dengan daya saing SDM. Meskipun diakui adanya kecenderungan surplus pangan yang diindikasi dengan meningkatnya produksi komoditas pangan, bukan berarti ancaman kerentanan pangan tidak terjadi. Alih fungsi lahan pertanian, kecenderungan peningkatan jumlah penduduk, resiko bencana alam dan iklim yang ekstrem di masa mendatang merupakan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mencapai ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan terus diperkuat dan diwujudkan melalui perbaikan produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, dan terjamin. Pertanian tanaman pangan dikembangkan untuk mencapai kesinambungan ketahanan pangan daerah dan berkontribusi signifikan bagi masyarakat guna memenuhi konsumsi pangan berkualitas.

Disisi lain, kondisi gizi masyarakat Kabupaten Nagan Raya menunjukkan kecenderungan perbaikan. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dan balita berat badan rendah terus berkurang, walaupun masih berpeluang terjadi di masa mendatang. Rendahnya kesehatan lingkungan, kemiskinan, terbatasnya aksesibilitas pangan pada keluarga miskin, dan belum optimalnya kerjasama lintas sektor/program merupakan pemicu terjadinya gizi buruk. Mengurangi angka balita gizi buruk secara berkelanjutan merupakan bagian penting dalam pencapaian target tujuan pembangunan milinium *(Millenium Development Goals/MDGs)*. Oleh karena itu, perlunya dukungan semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan gizi, baik dari institusi pemerintah, komponen masyarakat, maupun pelaku usaha/swasta dan pihak-pihak lainnya yang menaruh perhatian pada pangan dan gizi.

5. Terbatasnya Investasi dan Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Nagan Raya sekaligus mencapai visi jangka panjang daerah dibutuhkan penanaman modal

(investasi) yang cukup. Investasi tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur dan pengembangan industrialisasi berbasis pertanian. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu diprioritaskan, baik bersumber dari dana masyarakat dan dunia usaha, termasuk investor asing dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana secara proporsional. Hal ini, merupakan tantangan yang memerlukan berbagai penyempurnaan kebijakan investasi di daerah, pengaturan pajak, dan reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan pendanaan jangka panjang.

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya masih didominasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan non pajak) dalam mendorong kinerja pembangunan daerah. Implikasinya, tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan cukup besar. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan berperan penting dalam pendanaan pembangunan masih belum optimal. Salah satunya, adalah belum lengkapnya data tentang objek pajak dan retribusi daerah yang akurat. Data potensi PAD sangat berperan penting dalam penentuan target yang ditetapkan setiap tahunnya. Data potensi PAD juga sangat diperlukan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan peningkatan PAD serta pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabilitas.

Disamping itu, belum memadainya sarana pendukung bagi instansi pengelola PAD dan terbatasnya aparatur yang turut mengelola pajak daerah dan retribusi daerah menyebabkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak optimal. Dengan demikian, hasil penerimaan yang dicapai pun masih relatif rendah atau tidak mencapai target yang telah direncanakan.

Lemahnya penegakan hukum atau sanksi bagi wajib pajak juga mempengaruhi kecilnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Nagan Raya. Meskipun Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan Qanun-qanun yang mengatur PAD termasuk sanksinya, namun

akibat lemahnya penegakan hukum atau pelaksanaan sanksi tersebut disinyalir wajib pajak semakin leluasa untuk tidak membayar pajak.

Tingkat pendapatan masyarakat yang masih relatif rendah turut pula menyebabkan kontribusi PAD relatif kecil terhadap penerimaan daerah. Kondisi ini terjadi akibat minimnya investasi di Nagan Raya. Hingga saat ini aktivitas ekonomi masih sangat bergantung dari pengeluaran (belanja) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Sementara peran dunia usaha/swasta masih relatif kecil dalam mendorong percepatan ekonomi daerah di Kabupaten Nagan Raya.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah bersumber dari PAD merupakan keharusan dan dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan berbagai sumber PAD dapat dilakukan pada tingkatan kebijakan dan administrasi. Upaya peningkatan PAD dengan kebijakan dilakukan melalui strategi ekstensifikasi jenis pungutan retribusi daerah serta memperbaiki administrasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur koleksi melalui perbaikan basis data, penghitungan potensi penerimaan, mekanisme penagihan, dan lain sebagainya yang ditujukan untuk intensifikasi pungutan pajak dan retribusi.

Selanjutnya, strategi intensifikasi diarahkan untuk mengoptimalkan tingkat pemungutan penerimaan potensi objek-objek PAD yang sudah berjalan *(on-going)* yang didukung dengan penyempurnaan atau Qanun-qanun yang telah ada, pemantapan sumberdaya pemungut, dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan strategi ekstensifikasi diarahkan untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui perluasan objek-objek PAD yang sesuai dengan aturan/perundang-undangan yang berlaku disertai dengan qanun, dan optimalisasi potensi-potensi sumberdaya ekonomi berbasis sektor unggulan.

6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) saat ini di dunia mengalami kemajuan yang pesat dan terus berkembang. Kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya belum terbebas dari era "dunia tanpa batas". Masih ada daerah yang belum terlayani telepon seluler dan layanan internet berkualitas. Demikian pula dalam hal penguasaan dan pemanfaatan Iptek untuk mendukung pembangunan masih terbatas. Hal ini tercermin dari rendahnya kontribusi iptek di sektor produksi dan nilai tambah, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek serta hak intelektual (paten) yang dihasilkan masih terbatas. Berbagai hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi belum dapat dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Kolaborasi riset antara universitas dengan dunia usaha dan pemerintah masih belum sinergis.

7. Rendahnya Nilai Tambah Pertanian

Struktur ekonomi kabupaten Nagan Raya bertumpu pada sektor pertanian sebagai leading sektor. Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Nagan Raya menempati urutan teratas. Sektor ini juga menyerap hampir setengah dari tenaga kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi Naga Raya. Namun sektor ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan. Tingkat pertambahan nilai dari komoditas pertanian sebagai produksi utama Nagan Raya masih rendah. Sebagian besar ekspor yang dilakukan berupa bahan mentah. Hal ini menimbulkan kerentanan jika terjadi gejolak harga komoditas lokal dan global. Pengolahan komoditas pertanian menjadi penting untuk memberi nilai tambah, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan komoditas. Karena itu, perubahan paradigma pembangunan sektor pertanian mutlak diperlukan dengan prioritas peningkatan nilai manfaat dari produk-produk

pertanian.

8. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam secara berlebihan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari eksploitasi sumberdaya alam seperti hutan secara besar-besaran tanpa diimbangi dengan kegiatan rehabilitasi atau pemulihan fungsi hutan secara proporsional dan kegiatan penambangan yang tidak terkendali sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan yang dapat menimbulkan bencana. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan secara terkendali dan meningkatkan nilai tambah produk sumberdaya alam. Disamping itu, pemanfaatan sumberdaya alam harus berorientasi kepada pemanfaatan sumberdaya alam terbaharukan dan jasa lingkungan seperti wisata lingkungan, perdagangan karbon dan pemanfaatan sumberdaya hutan non kayu.

BAB IV
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2005-2025

4.1 VISI

Visi merupakan situasi atau keadaan ideal yang diinginkan untuk 20 tahun kedepan, sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta kondisi di masa yang akan datang. Visi merupakan dambaan atau harapan masa depan yang ingin diwujudkan secara nyata. Penetapan visi jangka panjang ini memperhatikan sejarah perkembangan Kabupaten Nagan Raya dan didukung oleh analisis potensi, faktor-faktor strategis serta perspektif kedepan dan dipadukan dengan hasil musyawarah unsur pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan tokoh masyarakat, stakeholders, DPRK dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang.

Visi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005–2025 adalah

" MEWUJUDKAN KABUPATEN NAGAN RAYA ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, DAN AMAN "

Visi pembangunan Kabupaten Nagan Raya selama dua puluh tahun ke depan merupakan kondisi masyarakat Nagan Raya yang diharapkan lebih Islami, Maju, Sejahtera, dan Aman sebagaimana tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

1. **Islami**, visi ini dimaksudkan bahwa masyarakat yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang religius, yakni masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya berdasarkan unsur-

unsur Syariat Islam yang dijalankan secara kaffah. Masyarakat yang religius menjadikan nilai-nilai luhur agama, bukan saja sebagai landasan moral dan etika hidup, melainkan juga menjadikannya sebagai pedoman dan pendorong di dalam mencapai prestasi-prestasi hidupnya, sehingga kemajuan yang dicapai tidak sekedar berada pada tataran kebendaan belaka, melainkan juga mencapai nilai-nilai kehidupan hakiki yang kekal.

2. **Maju,** Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dua puluh tahun mendatang Kabupaten Nagan Raya dan seluruh aparatur bertekat memajukan Kabupaten Nagan Raya dengan baik. Diharapkan pembangunan di bidang ekonomi pada dua puluh tahun mendatang telah berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, merata, efisien dan produktif diikuti dengan perkembangan sosial dan budaya, politik dan pemerintahan yang baik. Dalam dua puluh tahun ke depan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, adanya keterpaduan antar sektor (pertanian, industri pengolahan, jasa-jasa, dll) menyebabkan semakin kecilnya angka pengangguran karena terbukanya berbagai kesempatan kerja sekaligus akan mengurangi angka kemiskinan. Aktivitas ekonomi utama yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi menyebabkan pada akhirnya masyarakat telah, mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dan modern, serta meninggalkan keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupannya. Perwujudan kondisi tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki/menguasai kecakapan/keahlian yang tinggi, kelembagaan yang efektif dan lingkungan yang mendukung.
3. **Sejahtera**, Dimaksudkan bahwa dalam dua puluh tahun ke depan masyarakat Kabupaten Nagan Raya telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, mencakup pemenuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, kecukupan air bersih dan sanitasi dengan lingkungan hidup yang bersih, baik dipandang dari aspek material maupun spritual.

4. **Aman**. Yaitu terciptanya suasana yang kondusif bagi seluruh masyarakat, baik dalam beraktivitas untuk kehidupan sehari-hari maupun kebebasan mengeluarkan pendapat dalam hal berpartisipasi untuk pembangunan daerah. Nilai-nilai kearifan sosial, budaya dan agama senantiasa mewarnai segala aktivitas masyarakat yang bebas dan terkendali. Selain itu kehidupan berpolitik yang demokratis dan adanya sistem penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) ikut mendukung terciptanya suasana daerah yang tertib dan aman.

4.2 MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nagan Raya tersebut ditempuh melalui 7 misi pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dan islami;
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif;
3. Mengembangkan tata kepemerintahan yang baik;
4. Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah;
6. Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; dan
7. Penanggulangan dan pengurangan masyarakat miskin.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi Kesatu

Meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dan islami

Meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dan mampu menguasai berbagai teknologi dengan baik adalah dengan upaya mendorong

pembangunan masyarakat secara menyeluruh dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani, mahkluk pribadi maupun sosial dalam kerangka nilai-nilai humanis dan pluralis yang didukung dengan pelaksanaan/pengamalan syariat islam secara kaffah.

Misi Kedua

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang produktif dilakukan dengan upaya mendorong bidang perdagangan dan jasa sebagai aktivitas ekonomi utama dan menjadi tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktivitas perekonomian lainnya sebagai aktivitas pelengkap dan pendukung. Memperkuat perekonomian rakyat dengan mengembangkan pertanian yang berbasis perkebunan (agribisnis dan agro industri) guna meningkatkan nilai tambah bagi petani dan mendorong pengembangan ekonomi di wilayah pedesaan.

Misi Ketiga

Mengembangkan tata kepemerintahan yang baik

Mengembangkan tata kepemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum, serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Misi Keempat

Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan

Pembangunan wilayah yang berkelanjutan adalah upaya untuk mendorong pembangunan ruang dan infrastruktur daerah agar mampu mendukung akses transportasi yang dapat mewadahi aktivitas arus barang dan jasa sampai pada pasar barang tepat waktu, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Misi Kelima

Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah

Diarahkan dengan sasaran yang tepat akan terwujudnya kehidupan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan yang dapat memberikan pendapatan nyata kepada masyarakat, khususnya pekerja swasta (wirausaha) sehingga anggota masyarakat dapat mengatasi berbagai kebutuhan dasarnya dan memberikan kemampuan/konstribusi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya akan diarahkan kepada, (1) pengembangan sektor-sektor unggulan komparatif dan kompetitif daerah yang lebih intensif melalui pola terpadu, (2) menggerakkan dan memberi insentif bagi pihak swasta untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, (3) intensifikasi pengutipan pajak dan retribusi daerah dan mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru yang dapat mendorong kemandirian daerah dalam bidang pembiayaan pembangunan daerah.

Misi Keenam

Pengembangan Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan dan Pembanguhan

Diarahkan kepada sasaran terwujudnya masyarakat yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai sehingga setiap anggota masyarakat mampu mengolah dan memanfaatkan potensi sosial budaya dan potensi ekonomi yang ada di sekelilingnya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan pribadinya dan kehidupan masyarakat Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penguatan institusi desa dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. Diharapkan dengan penguatan tersebut institusi kemasyarakatan dapat lebih efektif, akuntabel dan mandiri dalam menjalankan misi dan tujuannya, sehingga mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan; peningkatan akses pada modal usaha dan sumber daya alam, pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka; peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat secara politis diarahkan pada penguatan kapasitas (*Capacity Building*) yang bertujuan untuk memperkuat organisasi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan keberpihakan pemerintah kepada pengembangan gampong-gampong tertinggal dan terpencil sehingga gampong

tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan desa lain.

Misi Ketujuh

Penanggulangan dan pengurangan masyarakat miskin

Pertama, perluasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha. Kedua, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya yang bersifat pemberdayaan. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin menjadi penting, karena menempatkan mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga mengubah pandangan masyarakat miskin dari beban *(liabilities)* menjadi potensi *(asset).* Berbagai proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan tersebut di atas perlu didukung oleh berbagai sistem bantuan dan jaminan sosial serta kebijakan ekonomi yang proporsional, termasuk tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN NAGAN RAYA

Visi dan misi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam arah pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025. Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya 2005-2025 diarahkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan prioritas dan potensi wilayah/kawasan disertai dengan indikator makro sebagai kerangka monitoring.

5.1 Sasaran Pokok Pembangunan

Sasaran pokok pembangunan ini berfungsi sebagai target pembangunan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Nagan Raya 20 tahun kedepan. Adapun sasaran pokok pembangunannya adalah :

5.1.1 Terwujudnya pembangunan masyarakat yang berkualitas dan Islami, dengan indikator antara lain :

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG);
2. Terwujudnya pendidikan gratis dan berobat gratis bagi keluarga miskin dan kurang mampu;
3. Meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan lulus uji kompetensi dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatnya angka harapan hidup;
4. Menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam dan meningkatnya jumlah lembaga pendidikan dengan basis Syariat Islam;
5. Meningkatnya lembaga-lembaga syiar islam yang non formal; dan

6. Terbinanya kerukunan hidup antarindividu, kelompok masyarakat, dan ummat beragama.

5.1.2 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang produktif, ditandai dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas kegiatan usaha pertanian, perkebunan rakyat, perikanan baik darat maupun laut dan usaha peternakan;
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan perkapita masyarakat dari berbagai kegiatan ekonomi;
3. Tumbuh dan berkembangnya sentra-sentra industri kecil, menengah dan industri rumah tangga;
4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian;
5. Meningkatnya pemasaran hasil-hasil industri, pertanian, perikanan dan peternakan;
6. Terbangunnya sarana dan prasarana dasar ekonomi dan investasi.

5.1.3 Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator sebagai berikut :

1. Terlaksananya proses pengurusan perizinan dan surat menyurat lainnya yang efektif dan efisien melalui pelayanan izin satu atap ditingkat pemerintah kabupaten dan kecamatan;
2. Kepatuhan dan kedisiplinan aparatur yang semakin tinggi;
3. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik;
4. Terciptanya etika, moral, dan budaya aparatur dalam pemerintahan sesuai syariat Islam;
5. Terciptanya situasi yang kondusif dan menurunnya angka kriminalitas;

6. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan gampong yang kuat, demokratis, dinamis, dan bertanggung jawab;
7. Terwujudnya komunikasi dan dialog publik yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal; dan
8. Terciptanya lembaga keuangan yang kuat dan mampu mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

5.1.4 Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, ditunjukkan dengan hal-hal antara lain :

1. Terbangunnya infrastruktur yang aman dari bencana alam dan tersedianya kawasan lindung (RTH, sempadan sungai, dan lainnya) yang proporsional dengan kawasan budidaya;
2. Terpenuhinya kebutuhan rumah serta terbentuknya lingkungan yang sehat dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarana permukiman serta tercapai pengelolaan kawasan yang berbasis masyarakat;
3. Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah;
4. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai tata ruang wiiayah, potensi, dan karateristik wilayah;
5. Terlaksananya implementasi dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang demi terwujudnya keserasian, kelestarian, dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan hirarki dan masing-masing fungsi pengembangan;
6. Terwujudnya optimalisasi sumber daya air yang diarahkan untuk menjamin daya dukung sumber daya air bagi penyediaan air yang berkelanjutan;
7. Terciptanya pembangunan sistem drainase yang baik dan efektif

sebagai tindakan untuk menghindari genangan air pada suatu tempat dalam jangka waktu yang lama dan pembangunan sistem drainase perkotaan diarahkan bagi terwujudnya keterpaduan pengelolaan kawasan hulu dan hilir dalam suatu daerah tangkapan air (*cathment area*) yang berfungsi dalam penanganan banjir dan rob;

8. Terbangunnya fasilitas publik pada zona-zona rawan bencana dengan penerapan teknologinya;
9. Tertibnya pembangunan sesuai dengan ketentuan yang diatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan terintegrasinya pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial kemasyarakatan.

5.1.5 Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah, dengan indikator antara lain :

1. Dihasilkan dan dimanfaatkannya teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatnya potensi sumber daya perdagangan secara terpadu, agar Kabupaten Nagan Raya menjadi pusat aglomerasi kegiatan ekonomi daerah, regional maupun nasional.
3. Berkembangnya kegiatan ekonomi lokal (*local economic*) dan peningkatan sistim informasi pasar dan komunikasi yang handal dalam menghadapi perdagangan bebas dan arus globalisasi;
4. Terciptanya iklim berusaha yang kondusif dan berkeadilan bagi pelaku usaha/dunia usaha dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat;
5. Terwujudnya pengembangan sektor pertanian sebagai mata pencarian utama masyarakat Kabupaten Nagan Raya dalam arti luas diarahkan pada peningkatan nilai tambah (*value added*) serta usaha

peningkatan produktifitas, efisiensi, serta dilakukan dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi;

6. Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh dimana pertanian, khususnya perkebunan, perdagangan dan jasa menjadi basis aktivtas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya;
7. Tersedianya insentif bagi pihak swasta untuk lebih meningkatkan investasi di daerah;
8. Meningkatnya intensifikasi pengutipan pajak dan retribusi daerah dan mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru yang dapat mendorong kemandirian daerah dalam bidang pembiayaan pembangunan daerah;
9. Berkembangnya badan usaha milik daerah (BUMD) yang mandiri dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD;
10. Terwujudnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak daerah/retribusi daerah membayar pajak;
11. Terwujudnya revitalisasi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan potensi ekonomi (sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan kelautan, serta potensi-potensi lainnya) yang telah ada serta menciptakan simpul-simpul ekonomi baru dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

5.1.6 Terwujudnya pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, ditandai hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya partisipasi stakeholders dan masyarakat dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan;
3. Terjalinnya kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya perilaku dan kemandirian masyarakat dalam upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit;
4. Terbukanya akses masyarakat dalam mendapatkan sumber-sumber modal dan investasi;
5. Terciptanya kebijakan dalam upaya mendukung program bapak angkat kepada masyarakat setempat bagi investor yang ingin menanamkan investasi di Kabupaten Nagan Raya;
6. Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya bidang tenaga kerja di daerah harus menjadi kekuatan ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian, serta bidang pembangunan lainnya yang didukung kemampuan teknologi yang makin meningkat;
7. Berkembangnya sektor-sektor unggulan komparatif daerah yang lebih intensif melalui pola terpadu dengan berbasiskan partisipasi masyarakat;
8. Terbukanya lapangan pekerjaan yang cukup guna menampung banyaknya penduduk usia kerja yang tiap tahun semakin meningkat dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemandirian tenaga kerja yang mampu bersaing di era global;
9. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; dan
10. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan

politik.

5.1.7 Terwujudnya penanggulangan dan pengurangan masyarakat miskin, dengan indikator antara lain :

1. Menurunnya angka kemiskinan sebesar 2 % pertahun;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana di wilayah-wilayah/kantong-kantong kemiskinan;
3. Meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin;
4. Terbukanya peluang bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin dan kurang mampu;
5. Tersedianya jaminan kesehatan gratis bagi kelompok masyarakat miskin;
6. Tersedianya bantuan/beasiswa pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin;
7. Terbangunnya perumahan layak huni secara bertahap dan berkesinambungan bagi keluarga miskin; dan
8. Adanya bantuan permodalan dan aset produktif lainnya bagi masyarakat miskin.

5.2 Arah Kebijakan

5.2.1 Bidang Agama, Sosial dan Budaya

Pembangunan bidang agama, sosial, dan budaya diarahkan untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dan berdaya guna berlandaskan nilai-nilai islami *(syariat islam)* dengan mempertahankan adat istiadat dan budaya serta meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, melalui:

a. Meningkatkan pelayanan keagamaan, sosial budaya, dan keluarga sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat dengan peningkatan sarana dan prasarana ibadah untuk menghidupkan syiar islam serta pembinaan kerukunan hidup intern umat beragama dan antar umat beragama;
b. Meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan syari'at Islam secara kaffah (menyeluruh) sebagai falsafah hidup dalam bermasyarakat;
c. Meningkatkan peran dan fungsi ulama dan lembaga keagamaan dalam pembangunan umat dan meningkatkan fungsi mesjid serta lembaga keagamaan lainnya sebagai pusat pembinaan umat;
d. Meningkatkan peran, fungsi, dan wewenang wilayatul hisbah dalam penegakan syariat Islam;
e. Meningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan agama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi;
f. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial di seluruh Kabupaten Nagan Raya;
g. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hukum terhadap perempuan, anak dan penyandang cacat serta lansia;
h. Meningkatkan peran dan hubungan antar lembaga pemuda dalam pembangunan;
i. Meningkatkan penguatan kelembagaan adat budaya yang islami dan memaksimalkan peran dan koordinasi antar lembaga adat dengan pihak-pihak yang terkait serta meningkatkan pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT);
j. Mengembangkan apresiasi budaya, kesenian, bahasa dan adat istiadat dan melestarikan dan memelihara situs dan cagar budaya;
k. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana budaya pemuda dan olah raga serta Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang budaya, pemuda, dan olah raga;

l. Meningkatkan penegakan hukum adat di tingkat gampong dan kemukiman;

m. Peningkatan dan pengembangan program Keluarga Berencana (KB) yang didukung dengan peningkatan/pengadaan fasilitas sarana dan prasarana program Keluarga Berencana (KB);

n. Pemberian jaminan dan perlindungan pemenuhan kebutuhan sosial dan hak-hak anak.

5.2.2 Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum

Melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. Meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efesien dan efktif dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;

c. Meningkatkan akuntabiitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pelaksanaan sistem yang berbasis kinerja baik indvidual maupun instansi;

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah;

e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/gampong yang semakin kuat, demokratis, dinamis dan bertanggung jawab;
f. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah;
g. Penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan;
h. Peningkatan peran dan fungsi Tuha Deulapan, Tuha Peut dalam melaksanakan Pemerintahan di Tingkat Mukim dan Gampong;
i. Peningkatan Kapasitas Aparatur Mukim dan Gampong dalam melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Mukim dan Gampong.
j. Meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disesuaikan standar ISO, serta semakin mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
k. Mengembangkan kualitas birokrasi pelayanan yang semakin efektif dan efisien, dengan aparatur pemerintah yang semakin profesional dan berkarakter, disertai dengan budaya penilaian kinerja organisasi publik yang semakin konsisten dan transparan;
l. Mengembangkan infrastruktur pelayanan pemerintahan yang semakin baik, dengan menerapkan sistem informasi manajemen daerah melalui infrastruktur teknologi yang baik dan informasi yang handal serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

2. Hukum

Penegakan hukum diarahkan pada :

a. Mewujudkan dan menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta peningkatan integritas dan profesionalisme dan moralitas aparat penegak hukum (Supremasi Hukum);
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakkan dan ketaatan terhadap hukum dan mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum di Kabupaten Nagan Raya agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c. Penertiban produk-produk hukum daerah atau Qanun Daerah yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat;
d. Penerapan secara tegas Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
e. Mengembangkan budaya hukum di masyarakat agar tercipta kesadaran dan ketaatan hukum dan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan hukum;
f. Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat; dan
g. Mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen guna mewujudkan pengayoman pada masyarakat.

3. Politik

a. Meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
b. Mempertahankan keberadaan dan kelangsungan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945;

c. Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d. Meningkatkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika dan berdemokrasi;
e. Mewujudkan media massa yang independen, kebebasan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat setiap masyarakat secara bertanggung jawab;
f. Meningkatkan kesadaran bela negara di dalam masyarakat dalam upaya mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia;
g. Memberikan motivasi kepada seluruh partai politik baik partai politik nasional maupun partai politik lokai untuk berkomitmen menciptakan keputusan politik yang memihak pada kepentingan masyarakat;

4. Ketertiban dan Keamanan

a. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
b. Meningkatkan kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman;
c. Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui peningkatkan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat;
d. Meningkatkan pelayanan umum dan bukti perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan bencana dengan dukungan dan peran serta aktif masyarakat;

e. Mewujudkan situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran pendidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah;
f. Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan dan penaggulangan peredaran dan penyebaran narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif;
g. Peningkatan sarana dan prasarana Poskamling dengan memberikan bantuan peralatan;
h. Penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik dan ekonomi, serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat.

5. Kapasitas Keuangan Daerah

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan sumber-sumber asli daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru;
b. Mengupayakan penambahan pendapatan daerah melalui berbagai sektor terutama melalui peningkatan penagihan;
c. Pengkajian secara kontinue terhadap produk hukum daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan menyesuaikannya dengan kondisi yang berkembang di daerah; dan
d. Peningkatan dan pembinaan kapasitas SDM aparatur pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Komunikasi

a. Mewujudkan pemerataan informasi kepada masyarakat secara lebih luas dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya media yang independen;

b. Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dengan pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat;
c. Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
d. Mewujudkan fungsi komunikasi dan teknologi informasi serta media massa secara optimal dan terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi pembangunan melalui media massa;
e. Pengembangan komunikasi antar pelaku pembangunan agar tercapai kesamaan persepsi yang dapat menumbuhkan motivasi membangun secara kebersamaan.

7. Perencanaan dan Pengawasan

a. Meningkatkan sarana dan prasarana perencanaan pembangunan daerah dengan membangun Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat diakses oleh semua pihak;
b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tenaga perencana, tenaga fungsional perencana dan tenaga pengawas;
c. Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan/stakeholders terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan;
d. Perencanaan, pemanfaatan ruang yang humanis dan berwawasan lingkungan;

5.2.3 Bidang Ekonomi

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan Kabupaten Nagan Raya sebagai daerah pertanian, perdagangan dan jasa yang cukup potensial, pembangunan daerah diarahkan untuk :

a. Pembangunan struktur perekonomian daerah yang kokoh dimana pertanian, khususnya perkebunan, perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya;
b. Pengembangan kelancaran jalur distribusi perdagangan barang dan jasa antar daerah maupun lingkup regional;
c. Peningkatan berusaha, optimalisasi potensi lokal, pemerataan pembangunan serta pengembangan keadilan dan kesempatan berusaha dalam iklim berusaha yang kondusif;
d. Peningkatan nilai tambah (*value added*) serta usaha peningkatan produktifitas, efisiensi, serta dilakukan dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi;
e. Mewujudkan sistem ekonomi yang effisien, produktif dan berdaya saing, mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha;
f. Mendorong tumbuhnya investasi dengan mengembangkan iklim investasi yang kondusif, pemenuhan sarana prasarana ekonomi dan menjamin kepastian berusaha;
g. Mengupayakan terciptanya kawasan industri dengan konsentrasi pengembangan berbagai jenis industri yang bersifat ramah lingkungan (*green industri*) dan industri yang bersifat padat teknologi dengan tetap mendorong eksistensi industri kecil *(home industri)* daerah sebagai penggerak kegiatan ekonomi lokal;
h. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi dalam kerangka peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, perluasan jaringan pasar yang berbasis pada pemanfaatan *e-commerce* dan mendukung pengembangan perdagangan dan jasa;
i. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan prinsip pengelolaan yang lestari;
j. Revitalisasi pertanian, kelautan, perikanan dan peternakan yang difokuskan

pada pengembangan komoditi unggulan dan mendorong pengembangan kluster-kluster industri pengolahan hasil industri;

k. Mempercepat proses pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja dan berusaha dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta kemandirian tenaga kerja yang mampu bersaing di era global;

l. Meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan meningkatkan industri kecil menengah dalam hal pengakuan kualitas dan kuantitas hasil Industri Kecil dan Menengah;

m. Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap hutan, laut dan hasilnya dengan tetap menjaga kelestarian hutan serta meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat pinggiran kawasan hutan terhadap pentingnya hutan bagi kehidupan;

n. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk membentuk tenaga kerja yang memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha yang tangguh, terampil, dan menguasai teknologi;

o. Meningkatkan pembangunan industri terutama melalui pemulihan, pengembangan sentra-sentra industri, peningkatan kemampuan ekonomi rakyat melalui pembinaan dan peningkatan kerajinan rumah tangga, industri kecil dan menengah;

p. Meningkatkan pembangunan industri yang diarahkan dengan mengutamakan pemanfaatan bahan baku/sumber daya alam lokal yang tersedia;

q. Meningkatkan dan memperluas jaringan pemasaran hasil usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

5.2.4 Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas sumber daya manusia Nagan Raya, melalui :

a. Peningkatan, pemerataan, dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
b. Pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik (usia wajib belajar) untuk keluarga miskin dan berprestasi;
c. Meningkatkan peran serta masyarakat yang lebih besar dan dunia usaha dalam memajukan dunia pendidikan serta mengupayakan terwujudnya pembangunan perguruan tinggi di Kabupaten Nagan Raya;
d. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang disertai dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembelajaran yang bermutu;
e. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi standarisasi dan mewujudkan pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan;
f. Pengembangan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dayah/pesantren, kejuruan, sampai dengan Perguruan Tinggi;
g. Penuntasan buta aksara sebagai bagian dari peniningkatan kualitas masyarakat dalam pendidikan dan meningkatkan sekolah kejuruan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam era globalisasi;
h. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki jati diri dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) melalui kualitas pendidikan yang tinggi;
i. Pemberdayaan dan pengembangan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
j. Mengembangkan Lembaga Pendidikan Non-Formal mulai dari tingkat

Play Group, Kejuruan, dan Balai Latihan Kerja, serta Pustaka Wilayah;

5.2.5 Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan melalui kegiatan-kegiatan promotif, preventif, dan kuratif serta mewujudkan perilaku sehat dan lingkungan yang sehat yang di dukung oleh profesionalisme aparatur dan sarana prasarana kesehatan yang memadai, melalui :

a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, aparatur kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan;
b. Peningkatan, dan pemeliharaan pelayanan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang bermutu, merata dan terjangkau;
c. Memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, individu dan keluarga disekitarnya serta meningkatkan pelayanan yang berkualitas di pusat-pusat kesehatan di Kabupaten Nagan Raya;
d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam upaya pembangunan kesehatan dan mewujudkan serta meningkatkan pelayanan gratis bagi masyarakat miskin dan kurang mampu;
e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan yaitu tenaga medis dan dokter;
f. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan pelayanan kesehatan dan lingkungan.

5.2.6 Bidang Infrastruktur

Untuk mewujudkan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya, pembangunan infrastruktur diarahkan melalui :

a. Membangun dan menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran dan perkotaan di Suka Makmue sebagai pusat ibukota Kabupaten Nagan Raya yang disertai dengan penataan yang sesuai dengan RTRK;
b. Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan aman dari bencana alam serta diikuti dengan penertiban bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan RTRW, RTRK dan aturan yang berlaku;
c. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah tertinggal, daerah pesisir dan daerah-daerah perbatasan;
d. Meningkatkan dan pembangunan waduk dan embung beserta sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pengawetan air, sumber daya air, dan pengendali daya rusak air;
e. Memelihara dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana konservasi sumber daya air yang telah ada serta peningkatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi teknis yang sudah ada;
f. Melakukan pengawasan izin sarana dan prasarana terhadap pemanfaatan air tanah secara terkendali dan meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam khususnya pertambangan;
g. Peningkatan dan pembangunan pengaman sungai, muara, dan pantai;
h. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat;
i. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana transportasi dan meningkatan pembangunan rambu-rambu lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan;
j. Penegakan hukum lingkungan kepada para pelaku kegiatan/usaha yang membawa dampak lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas SDM lingkungan hidup;

k. 'Penyedian sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diikuti dengan peningkatan keahlian petugas dengan melaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penanggulangan bencana;

l. Menginventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah (P4T) serta menyediakan sertifikat tanah bagi masyarakat ekonomi lemah dan wilayah perbatasan;

m. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari dengan mengoptimalkan manfaat hutan sesuai fungsinya dan batasannnya melalui kegiatan penataan kembali pengusahaan hutan (redesign), rehabilitasi hutan dan lahan;

n. Menyediakan dan mendayagunakan sumber daya alam tambang yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta menyediakan informasi geologi dan sumber daya mineral;

o. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dan sanitasi dasar yang berkualitas, efisien dengan harga yang terjangkau;

p. Meningkatkan pemenuhan ketersediaan tenaga listrik terutama dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik pada daerah-daerah tertinggal dan terisolir;

q. Membangun infrastruktur dan mengembangkan telematika daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan informasi daerah baik secara regional, nasional maupun global;

r. Meningkatkan peluang eksploitasi pertambangan skala besar, menengah dan kecil serta membina, mengawasi dan menertibkan usaha pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan usaha pertambangan rakyat;

s. Meningkatkan pelayanan dan pemahaman masyarakat penambang dan aparatur pemerintah daerah khususnya dalam aspek peraturan dan perundang-undangan di bidang pertambangan.

t. Membuat perangkat hukum di bidang sumber daya energi, mineral, batu bara,air bawah tanah dan hasil tambang lainnya.

u. Peningkatan sistem dan manajemen transportasi sebagai faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan, ketertiban dan keamanan, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

v. Peningkatan pelestarian kawasan bersejarah (konservasi dan preservasi).

5.3 Tahapan dan Prioritas

Untuk mencapai visi, misi dan sasaran sebagaimana dimaksud sebelumnya, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran dalam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diuraikan kembali secara spesifik menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

5.3.1 Tahapan Pembangunan ke-1 (2005 – 2009)

Kondisi pembangunan Kabupaten Nagan Raya pada tahap ke I selama tahun 2005-2009 berada pada tahap pemulihan pasca berakhirnya konflik dan bencana tsunami yang melanda wilayah pesisir Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 26 Desember 2004. Pemulihan kondisi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana tsunami

dan korban konflik merupakan prioritas yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di semua bidang pembangunan, meliputi infrastruktur, ekonomi, sosial, agama dan kelembagaan. Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dilakukan secara sinergis dan integratif yang turut juga melibatkan BRR NAD-Nias, Pemerintah Aceh, NGO/LSM, dan masyarakat Internasional.

Pada akhir tahapan pembangunan ke-1, beberapa indikator kinerja pembangunan yang mempengaruhi secara signifikan perekonomian Kabupaten Nagan Raya yang ingin dicapai adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diharapkan mencapai 7-8 persen, tingkat kemiskinan menjadi 25-26 persen, pendapatan per kapita 8,0 juta rupiah berdasarkan harga konstan, dan tingkat pengangguran menjadi 5 persen. Untuk mencapai target atau indikator pembangunan yang diharapkan, diperlukan strategi penggunaan pendanaan yang optimal dari berbagai sumber pendanaan yang sah sesuai dengan rencana pemanfaatan masing-masing sumber pendanaan. Hal ini diperlukan mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Kabupaten Nagan Raya untuk menggerakkan seluruh sektor ekonomi dan bidang pembangunan, maka diperlukan upaya dalam pengembangan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, di samping juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.

Untuk mencapai target tersebut, kebijakan ekonomi makro Kabupaten Nagan Raya dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas sebagai imbas dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah sosial mendasar yang dihadapi, khususnya pengangguran dan kemiskinan, disamping memberikan efek pengganda *(multiflier effect)* yang lebih luas terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut didorong dengan percepatan pertumbuhan pada lapangan usaha yang selama ini cukup berperan kontribusinya dan menjadi *leading sector atau prime sector* didalam struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya, terutama sektor primer dengan andalan lapangan usaha pertanian, disamping sektor tersier. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut tetap mengedepankan kualitas dan kelestarian lingkungan sehingga hasil yang akan dicapai nantinya dapat terjaga dengan baik dan berkesinambungan.

Revitalisasi pertanian, termasuk pengembangan komoditas perkebunan unggulan, seperti kelapa Sawit menjadi prioritas. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian terpadu dan sinergitas dalam mendukung revitalisasi perkebunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Pengembangan komoditas kelapa sawit dalam upaya menyerap tenaga kerja lokal, pendayagunaan lahan terlantar, memenuhi kebutuhan minyak sawit dunia, dan peningkatan pendapatan masyarakat petani di Kabupaten Nagan Raya.

Terhadap lapangan usaha yang masih rendah kontribusinya, juga diarahkan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan secara terpadu, simultan, dan berkesinambungan sehingga disparitas (ketimpangan) antarlapangan usaha didalam menghasilkan kontribusinya (termasuk pertumbuhannya) dapat diperkecil dan diharapkan lapangan usaha ini mampu berperan strategis terhadap percepatan perekonomian Kabupaten Nagan Raya.

Selain itu, diarahkan juga pada penguatan lapangan usaha industri pengolahan berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat menghasilkan berbagai produk-produk unggulan guna meminimalkan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Dengan upaya ini diharapkan keterkaitan antara pertanian dan industri pengolahan dapat berjalan secara strategis, terpadu, dan integratif sehingga mampu memperluas lapangan kerja, menciptakan nilai tambah yang lebih besar, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nagan Raya. Di samping itu, juga

dilakukan dengan mewujudkan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kepastian hubungan terhadap usaha dan meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit.

Disamping pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial yang merupakan bagian dari pemberdayaan ekonomi, peningkatan investasi dan pendapatan daerah, untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat secara cepat dan berkesinambungan, pada tahap pembangunan I periode 2005-2009 diprioritaskan pula penguatan Syariat Islam, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, dan pembangunan keamanan dan ketertiban.

Sejak pemberlakuan syariat Islam secara legal formal di Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mendirikan beberapa lembaga atau instansi terkait dengan penyelenggaraan Syariat Islam, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Mahkamah Syar'iyah, Baitul Mal, Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah. Pembentukan lembaga-lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya dan mempercepat pencapaian visi menuju Nagan Raya yang Islami.

Prioritas pembangunan Syariat Islam diarahkan untuk berfungsinya secara optimal kelembagaan/ormas Islam, termasuk peningkatan kapasitas lembaga sosial keagamaan yang ada di daerah dalam menyahuti berbagai dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat dan pembangunan daerah. Disamping itu, dilakukan juga penguatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, penyediaan sarana dan prasarana keagamaan yang semakin memadai seperti masjid, meunasah, mushalla, termasuk pengadaan buku bacaan (kitab-kitab); meningkatkan peran para ulama dan pemuka agama dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan daerah yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan kemasyarakatan dalam upaya mendukung pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya.

Perkembangan pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang kian pesat menuntut kesiapan sumberdaya manusia (SDM) di daerah, termasuk di

Kabupaten Nagan Raya. Untuk mewujudkan SDM yang cerdas, handal, profesional, dan berdaya saing ini harus diikuti dengan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang lebih baik pula. Tidak hanya menyangkut dengan komitmen dan partisipasi aktif masyarakat sendiri, tetapi juga dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai sehingga memungkinkan terlaksananya sistem pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kabupaten Nagan Raya mengacu pada amanat yang terkandung di dalam UUD 1945 pasal 31, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, cakap dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab.

Dalam kaitan ini, pembangunan tahap I pembangunan pendidikan di Kabupaten Nagan Raya diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, terjangkau, dan tersentralisasi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal pada semua jenjang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan membangun sarana dan prasarana pendidikan menurut jenjang pendidikan, mensukseskan wajib belajar pendidikan sembilan tahun, dan memberikan perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung sesuai dengan potensi dan kebutuhannya (seperti anak miskin, anak kelainan fisik dan mental, serta anak yang memiliki kecerdasan dan bobot istimewa).

Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan mampu menumbuhkan/mendorong meningkatnya pengetahuan peserta didik. Lebih lanjut, dengan pendidikan mampu mewujudkan masyarakat yang bertaqwa, beriman, berakhlak mulia, berbudi luhur, mandiri, disiplin, dan sadar akan

tanggung jawabnya didalam membangun daerah, serta memiliki wawasan dan etos yang tinggi.

Di bidang pembangunan kesehatan, diprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan, melengkapi fasilitas pendukung kesehatan berkualitas, peningkatan dan pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai akan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Nagan Raya yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup (UHH), menurunnya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian Ibu (AKI). Pada tahap pembangunan tahun 2005-2009 ini, pembangunan kesehatan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals-MDGs) yaitu yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak; pencegahan penyakit menular, khususnya HIV-AIDS dan malaria; serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Prioritas pembangunan infrastruktur adalah pada upaya pemulihan sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, perumahan, sistem jaringan air bersih dan sanitasi, sistem transportasi, infrastruktur sumber daya air dan sistem komunikasi serta sarana pos dan telekomunikasi. Mengingat listrik merupakan kebutuhan vital dalam mendorong perekonomian daerah, diharapkan dalam periode ini pembangunan PLTU di Suak Puntong dapat dilaksanakan sehingga mampu memenuhi kebutuhan sumber energi di Kabupaten Nagan Raya.

Di bidang kesejahteraan sosial, fokus pembangunan diarahkan pada identifikasi dan inventarisasi permasalahan kesejahteraan sosial, pengembangan data base yang handal, peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial yang lebih adil, peningkatan profesionalisme pelayanan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan kemitraan lintas sektor dan lintas wilayah. Sedangkan pembangunan budaya ditekankan pada upaya untuk menumbuhkan kembali khazanah budaya, adat-istiadat, kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional yang

berkembang di Kabupaten Nagan Raya sebagai sebuah warisan luhur yang harus dilestarikan.

5.2.2 Tahapan Pembangunan ke-2 (2010-2014)

Pada tahap periode ini merupakan kelanjutan dari periode pembangunan tahap pertama. Dalam tahap ini, prioritas pembangunan diarahkan untuk menguatkan kapasitas ekonomi daerah dalam rangka mengantisipasi berakhirnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Nagan Raya. Dalam periode ini diperkirakan aktivitas ekonomi yang mendukung rehabilitasi dan rekontruksi cenderung menurun secara signifikan. Mengantisipasi hal tersebut, penguatan pertanian tetap menjadi prioritas, di samping juga memfokuskan pengembangan agroindustri di Nagan Raya. Berkembangnya industri berbasis pertanian melalui intensifikasi untuk peningkatan produksi dan kualitas komoditas andalan memberikan nilai tambah produk pertanian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menurunkan beban tanggungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengembangan wilayah serta pengembangan wilayah strategis sesuai dengan potensi.

Pada akhir tahapan pembangunan ke-2, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diharapkan setara dengan Provinsi Aceh (mencapai 8-9 persen), tingkat kemiskinan menurun menjadi 20 persen, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4 persen.

Pada tahap kedua ini, prioritas bidang syariat Islam dititikberatkan pada upaya semakin berperannya dan menguatnya lembaga-lembaga pelaksana Syariat Islam serta makin baiknya pengintegrasian Syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan terutama dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam tahap ini juga diindikasikan dengan semakin berkualitasnya pendidikan agama

Islam, menurunnya angka kemaksiatan dan pelanggaran Syariat Islam, dan peran ulama dalam kehidupan sosial-ekonomi dan pembangunan semakin meningkat. Pembangunan menuju masyarakat Nagan Raya yang Islami juga ditandai dengan tercapainya tertib sosial, kerukunan dan harmonisasi dalam masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, meningkatnya profesionalisme aparatur, serta peningkatan pelayanan publik untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) sebagai bagian dari peningkatan IPM Kabupaten Nagan Raya. Untuk mencapai tersebut, penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun tetap menjadi prioritas yang akan dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan bersumber dana dari Pemerintah Pusat, dana Otsus Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, rintisan munculnya sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten Nagan Raya juga menjadi agenda prioritas pada pembangunan tahap kedua ini. Demikian pula pemberantasan buta aksara untuk meningkatkan angka melek huruf bagi masyarakat yang sulit mengakses pendidikan formal.

Prioritas pendidikan menengah melalui pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan sesuai dengan kebutuhan dan realitas dunia kerja. Pengembangan Lembaga PAUD pada periode ini diprioritaskan pada target tertampungnya semua anak usia 0–6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun non formal. Pelaksanaan konsep pendidikan Islami di seluruh institusi pendidikan dengan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan standar pendidikan yang berbasis nilai Islami serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lokal, nasional dan global. Upaya percepatan implementasi sistem pendidikan Islami juga telah dikuatkan dengan tersedianya landasan hukum yang dapat menjadi pedoman bagi

sekolah dan institusi terkait serta peningkatan kuantitas dan kualitas guru yang dapat mengimpelementasikan nilai Islami dalam mata pelajaran.

. Dalam periode ini, prioritas pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, sebagai bagian dari peningkatan angka IPM dan mencapai tujuan pembangunan milinium (MDGs). Langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut melalui peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan balita gizi baik dan yang diimunisasi lengkap, peningkatan cakupan sanitasi dasar, peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan angka kesembuhan penderita penyakit tertentu, dan peningkatan manajemen kesehatan yang akuntabel.

Pembangunan infrastruktur pada periode ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah, antara lain pembangunan jaringan infrastruktur transportasi yang mantap dan handal serta terintegrasi, disertai dengan terbukanya akses jalan ke sentra-sentra produksi, baik pertanian, obyek wisata, daerah terisolir, serta peningkatan rasio aksesibilitas jalan terhadap luas daerah. Selain sarana transportasi, dilakukan pula untuk pemenuhan kecukupan air bagi aktivitas ekonomi masyarakat, peningkatan rasio pelayanan jaringan irigasi terhadap luas areal irigasi, peningkatan cakupan layanan air bersih di perdesaan dan perkotaan, peningkatan cakupan layanan persampahan, terutama di wilayah perkotaan, peningkatan cakupan layanan penerangan jalan umum pada ruas jalan kabupaten di setiap wilayah kecamatan, penataan ruang terbuka hijau di setiap wilayah kecamatan, serta peningkatan rasio dan cakupan rumah layak huni.

Pembangunan lingkungan hidup diprioritaskan pada optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup melalui kelayakan AMDAL yang komprehensif, tersedianya akses informasi terhadap lingkungan hidup, peningkatan jumlah kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat yang peduli lingkungan hidup,

tersedianya qanun pengaturan sampah, pengaturan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta bertambahnya revegetasi lahan kritis.

Di bidang kesejahteraan sosial diprioritaskan pada terpenuhinya pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan sosial kemasyarakatan. Selain itu, termasuk juga bantuan dan syiar-syiar keagamaan serta aspek sosial lainnya, terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama serta sikap kesalehan sosial umat beragama, serta terpenuhinya sarana dan prasarana ibadah.

Di bidang pemerintahan dan pelayanan umum diprioritaskan pada peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik (*better*), lebih cepat (*faster*) dengan biaya wajar menurut aturan yang berlaku (*cheaper*) dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya serta memenuhi kepuasan masyarakat, peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan disertai dengan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan taat pada aturan yang berlaku, peningkatan tertib pengelolaan aset dan barang daerah serta pendayagunaannya untuk kemajuan daerah; keterbukaan informasi dan komunikasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik melalui media cetak, elektronik dan media teknologi terkini lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK, tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan kecamatan terlaksananya fasilitasi untuk peningkatan kapasitas pelayanan pemerintahan gampong, maupun maupun usaha-usaha ekonomi gampong serta terwujudnya organisasi perangkat daerah yang ramping struktur tetapi kaya fungsi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peningkatan profesionalisme aparatur, baik dalam kompetensi teknis dan substantif menurut tupoksinya maupun untuk pelayanan kepada masyarakat disertai dengan perbaikan kesejahteraan aparatur, terlaksananya reformasi birokrasi di daerah

secara menyeluruh sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

5.2.3 Tahapan Pembangunan ke-3 (2015-2019)

Sebagai bagian dari kelanjutan pembangunan periode kedua, pembangunan tahap ke-3 (tahun 2015-2019) ini memfokuskan pada pemantapan basis pengembangan industri pengolahan berbasis hasil pertanian atau berkembangnya agroindustri. Hal tersebut didukung pula dengan prioritas pendidikan kejuruan pada tahap sebelumnya yang menyediakan sumber daya manusia terampil serta mendukung berkembangnya industri pengolahan. Pada tahap ini, industri pengolahan kelapa sawit (CPO) cukup berkembang di Nagan Raya, yang juga diikuti mulai munculnya industri-industri turunan CPO serta aktivitas perdagangan dan jasa yang terus menggeliat. Selain itu, investasi swasta mulai berkembang ke sektor-sektor produktif yang didukung finansial dari perbankan dan non lembaga keuangan.

Pada akhir tahapan pembangunan ke-3, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diharapkan setara dengan Provinsi Aceh sebesar 9-10 persen, tingkat kemiskinan di bawah dari 15 persen, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3 persen. Harapan tersebut diperkirakan akan terwujud sejalan dengan kondisi keamanan dan perdamaian yang makin mantap, supremasi hukum berjalan non-diskriminatif dan adil, serta menurunnya tindak kekerasan dan kriminalitas. Selain itu, konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat dapat diselesaikan pula melalui musyawarah dan institusi-institusi kearifan lokal. Dengan demikian, unsur-unsur tersebut diatas memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi berlanjutnya proses pembangunan di Kabuapten Nagan Raya.

Dalam bidang pelaksanaan syariat Islam, seluruh komponen masyarakat telah mampu mengimplementasikan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan

sehingga menciptakan kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam tahap ke tiga ini, pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) sebagai upaya peningkatan IPM dengan status tinggi melalui perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 (dua belas) Tahun. Upaya yang dilakukan untuk mendukung antara lain, yaitu pengembangan pendidikan satu atap (sembilan tahun), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Selanjutnya, dalam tahapan ini pula di bidang pendidikan akan dibangun pendidikan tinggi guna meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Nagan Raya dalam mendukung industrialisasi dan pengembangan komoditas unggulan berorientasi ekspor.

Pembangunan kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sebagai upaya peningkatan IPM berstatus tinggi dan mencapai target tujuan MDGS pada tahun 2015. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan balita gizi baik dan yang diimunisasi lengkap, peningkatan cakupan sanitasi dasar, peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan angka kesembuhan penderita penyakit tertentu, penyusunan rancangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan, dan peningkatan manajemen kesehatan yang akuntabel, serta penuntasan jumlah penduduk miskin yang menjadi program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Untuk mendukung industrialisasi dan kegiatan ekspor, pembangunan infrastruktur semakin dimantapkan, terutama jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, sistem transportasi darat, laut, dan udara. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung aktifitas ekonomi yang mengarah pada pemantapan kondisi perekonomian yang berbasis industri dimana arus

pergerakan orang, barang, dan jasa lebih difokuskan pada aktifitas pabrikasi dan kegiatan ekspor. Selain itu, sarana air bersih dan sanitasi mulai tersedia dengan baik seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk kegiatan industri dan pertanian dengan tetap memperhatikan upaya pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan untuk mempertahankan fungsi dan daya dukungnya terhadap peningkatan aktifitas ekonomi. Disisi lain, sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika terus diperkuat dalam rangka mendorong pengembangan iptek dan peningkatan daya saing guna mendukung aktifitas perekonomian dan dunia usaha.

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Bidang pemerintahan dan pelayanan umum diprioritaskana pada pemantapan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, semakin mantapnya kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik (better), lebih cepat (faster) dengan biaya wajar menurut peraturan yang berlaku (cheaper) dalam lingkup kewenangan Kabupaten Nagan Raya serta memenuhi kepuasan masyarakat, pemantapan reformasi birokrasi mulai berkembang ke arah pelayanan publik dengan dukungan teknologi e-goverment dan teknologi informasi yang terkini.

Dalam pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Upaya yang dilakukan antara lain menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal

masyarakat terutama pada kalangan generasi muda dalam peran sertanya untuk pembangunan.

Pembangunan kepemudaan diupayakan melalui peningkatan kualitas pemuda sebagai individu dan dalam organisasi kepemudaan. Sedangkan pembangunan bidang olah raga diarahkan pada terpenuhinya sarana olah raga sehingga dapat meningkatkan prestasi olah raga.

5.2.4 Tahapan Pembangunan ke-4 (2020-2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahapan pembangunan ke-3, maka pembangunan tahap ke-4 (periode 2020-2025) ditujukan untuk optimalisasi pembangunan di seluruh sektor/bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhir periode ini, prioritas pembangunan difokuskan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy) yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri pengolahan pada tahap sebelumnya yang sesuai dengan komoditas andalan Kabupaten Nagan Raya. Pada akhir tahapan pembangunan ke-4, pertumbuhan PDRB diharapkan setara dengan Provinsi Aceh sebesar 11-12 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi dibawah dari 10 persen, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2-3 persen.

Untuk pemantapan industrialisasi berbasis pertanian, pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengembangkan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah mempunyai nilai tambah (added values) yang berbasis teknologi dan informasi, mendukung kemitraan UKM dan Swasta

Nasional dan Asing dalam pemasaran produk unggulan di level nasional dan internasional serta mengembangkan cluster agro industri.

- Dalam tahapan terakhir ini, pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk mendukung dan memantapkan pengembangan agroindustri sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas di Kabupaten Nagan Raya. Upaya yang dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Nagan Raya, serta memantapkan infrastruktur yang mendukung kelancaran transportasi darat, laut dan udara dari dan ke wilayah Nagan Raya.

Di bidang pemerintahan dan pelayanan umum, diprioritaskan pada optimalisasi kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik (*better*), lebih cepat (*faster*) dengan biaya wajar menurut peraturan yang berlaku (*cheaper*) dalam lingkup kewenangan Kabupaten serta memenuhi kepuasan masyarakat, optimalisasi reformasi birokrasi ke arah pelayanan publik dengan dukungan teknologi e-goverment dan teknologi informasi yang terkini untuk aspek pelayanan perizinan investasi dan perizinan lainnya.

Selanjutnya, di bidang pembangunan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai daya saing, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu ber-inovasi dan kreatif, serta tetap memegang teguh nilai-nilai Islami dalam rangka mendukung pengembangan agroindustri dan industri kreatif. Pembangunan SDM akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan menguasai kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mewujudkan generasi penerus yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan mampu bersaing di dunia internasional.

BAB VI
KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kabupaten Nagan Raya, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan. RPJP ini juga menjadi pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya selama periode tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan yaitu ***"Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Islami, Maju, Sejahtera, dan Aman"***, perlu didukung oleh seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang cakap *(capable)*, berkualitas dan demokratis;
2. Penerapan hukum Islam secara kaffah;
3. Ketata-pemerintahan yang baik *(good governance);*
4. Konsistensi kebijakan pemerintah kabupaten;
5. Keberpihakan pemerintah kepada ekonomi rakyat;
6. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; dan
7. Mekanisme kontrol dan pengawasan *(check and balance)* melalui pelaksanaan transparansi serta akuntabilitas publik yang baik.

Dukungan dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap jalannya

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan akan membawa dampak yang sangat baik dalam berjalannya sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.

Koordinasi internal antarinstansi maupun eksternal antara pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Provinsi Aceh serta para donatur yang ingin membangun Kabupaten Nagan Raya merupakan aspek penting yang harus terus menerus diciptakan dalam rangka terwujudnya arah pembangunan, misi dan visi Kabupaten Nagan Raya 20 tahun ke depan.

BUPATI NAGAN RAYA,

Drs. T. ZULKARNAINI